



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



LKIP 2022

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Assalamualaikum Wr.Wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat yaitu 'Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi'. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

LKIP Tahun 2022 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja tercapai 118,19% seiring dengan masuknya era endemic Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang hendak dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga dokumen LKIP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandung, 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng
Pembina Utama



DAFTAR ISI

BAB I.

PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	3
Sumber Daya Manusia.....	5
Isu strategis.....	6
Sistematika Penyusunan.....	8

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA.....	9
Cascading Kinerja.....	11
Perjanjian Kinerja.....	12
Rencana Kerja dan Anggaran.....	13

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	15
Sasaran Strategis I.....	16
Sasaran Strategis II.....	21
Sasaran Strategis III.....	38
Sasaran Strategis IV.....	42
Sasaran Strategis V.....	44
Sasaran Strategis VI	47

BAB IV.

PENUTUP.....	50
---------------------	-----------

LAMPIRAN.....	52
----------------------	-----------



BABI

PENDAHULUAN

KANTOR
GUBERNUR JAWA BARAT





LATAR BELAKANG

LKIP SETDA 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan membenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah 'merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif'

Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

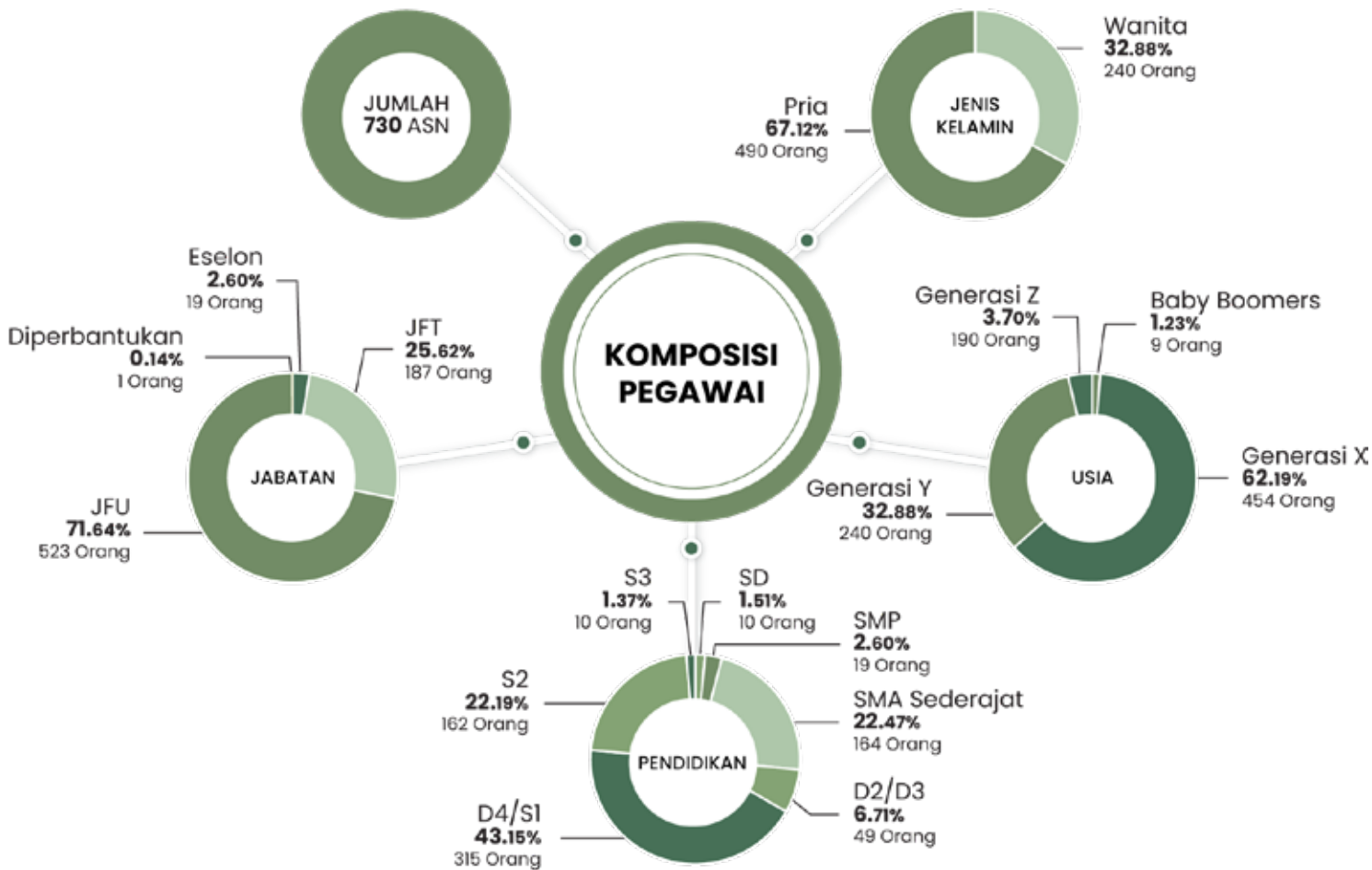
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit Eselon IIb yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervisi perangkat daerah di sesuaikan dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (sembilan) unit Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;



4. Biro Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
8. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
9. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

SUMBER DAYA MANUSIA



Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Jabar) memiliki pegawai sebanyak 1.264 orang dengan komposisi 730 ASN. ASN terdiri dari 702 PNS dan 28 CPNS. Dari sisi kualitas, potensi ASN pada Setda Jabar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai didominasi jenjang S1 (43,15%) dan S2 (22,19%). Namun demikian, Setda Jabar memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 49 pegawai (6,71%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 157 pegawai (21,51%). Hal ini dibutuhkan perhatian lebih dikarenakan terdapat kekosongan pada jabatan kelas 6 (pengelola) di lingkup Setda Jabar

Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 42-57 tahun atau generasi X sebanyak 454 orang ASN (62,19%) dan untuk generasi Y dengan rentang usia 26-41 tahun sebanyak 240 orang ASN (32,88%).

Sedangkan generasi Z dengan usia dibawah 26 tahun sebanyak 27 orang ASN (3,70%). Setda Jabar juga masih memiliki ASN dengan rentang usia diatas 58 tahun atau generasi Baby Boomers sebanyak 9 orang (1,23%). Keempat komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Setda Jabar memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama serta memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi dan juga diharapkan dapat mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif mengingat mayoritas penerima layanan saat ini merupakan generasi milenial yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.



ISU STRATEGIS

MEMPERHATIKAN SITUASI LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL, DAERAH, SERTA INTERNAL. TERDAPAT 5 (LIMA) ISU STRATEGIS PADA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

TERBITNYA PERATURAN PUSAT

Selain pandemi COVID-19, perubahan mendasar yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah adalah terbitnya beberapa peraturan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya: 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; dan 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi kenyataan dengan dialihkannya sebagian pejabat struktural eselon IV menjadi fungsional sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada Desember 2021 dan bulan Juni 2022 lalu. Dengan kebijakan tersebut, unit kerja eselon IV menjadi unit yang paling terdampak proses penyederhanaan birokrasi ini. Unit kerja tersebut berperan menjadi ujung tombak keahlian pada tingkat operasional, yang dengan proses penyederhanaan diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelaksanaan tugas terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Unit eselon IV yang masih tersisa pada unit kerja adalah yang bersifat manajerial umum yaitu yang menangani ketatausahaan mengingat rumpun tugasnya yang sangat heterogen. Sekretariat Daerah mengalami perubahan sangat signifikan dari perubahan birokrasi ini. Dari 81 jabatan terdapat 72 jabatan eselon IV yang disederhanakan. Pada setiap Biro, rata-rata hanya tersisa 1 dari 9 jabatan eselon IV.

Sekretariat Daerah, yang semula dominan struktural menjadi fungsional. Untuk beralih ke arah sistem birokrasi yang baru, perlu dibangun kebijakan tata hubungan kerja baru, serta perubahan mindset, cultural set dan skill set aparatur. Hingga beberapa tahun mendatang, unit kerja dan aparatur masih memerlukan proses adaptasi agar perubahan ini berjalan efektif dan menghasilkan dampak bagi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyederhanaan birokrasi menjadi langkah awal untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Daerah yang agile, lebih efektif dan lebih ramping.

PANDEMI COVID-19

Dipenghujung tahun 2022 ini, pandemi Covid-19 masih menjadi isu penting yang harus dicermati di Indonesia dan di Jawa Barat. Pandemi COVID-19 memang tak hanya melanda sektor kesehatan, ia kini telah berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi Jawa Barat. Tak dapat dipungkiri, angka penduduk miskin dan pengangguran di Jabar bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,08. Pendapatan daerah mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan penanganan dampak COVID-19 meningkat.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pelayanan publik yang diberikan Sekretariat Daerah. Sebagian penyelenggaraan pelayanan publik dibatasi pelaksanaannya, seperti pemberian layanan langsung, dan penerimaan kunjungan. Disisi lain, refocusing anggaran memaksa organisasi untuk menunda penyediaan dan perbaikan beberapa sarana/prasarana penunjang pelayanan, seperti peralatan kantor dan ruang pelayanan terpadu. Modernisasi sarana dan prasarana perkantoran di Sekretariat Daerah juga perlu diprioritaskan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik mendatang. Sebagian besar sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah kurang representatif dan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan publik dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil survei, kecepatan pelayanan menjadi persoalan utama yang dikeluhkan publik. Sementara dari sisi aparatur, selain kualitas sarana/prasarana, kualitas jaringan telekomunikasi masih menjadi persoalan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mendukung pola kerja baru aparatur.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sebagai pengampu perwujudan kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang akuntabel dan reformis, Sekretariat Daerah mengemban tugas untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada evaluasi nasional yang dilakukan Kementerian PANRB. Selama 7 tahun berturut-turut, hasil evaluasi SAKIP Jawa Barat memperoleh predikat A. Meskipun secara nasional selalu berada dalam kelompok lima provinsi terbaik, hasil ini dinilai belum optimal. Pemerintah daerah menargetkan nilai SAKIP dapat meraih predikat AA, yang sementara ini hanya diraih Provinsi DIY.

Sementara untuk penilaian reformasi birokrasi, pemerintah daerah masih berada pada predikat BB. Setiap tahun terdapat peningkatan nilai, tetapi hal ini belum cukup memuaskan. Pada akhir periode RPJMD 2019-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menargetkan Indeks RB dapat memperoleh predikat A. Pencapaian target Indeks RB ini memiliki makna penting sebagai wujud keberhasilan Gubernur memenuhi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir periode masa jabatan.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap citra pemerintahan daerah, tetapi terutama adalah meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan pemerintahan.

Selain sebagai indikator kinerja utama organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi ini juga penting sebagai wujud dukungan Sekretariat Daerah dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), pada Pilar Hukum dan Tata Kelola - Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat).

Dengan adanya perubahan-perubahan di atas, tentunya ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, mengingat perubahan tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.



SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, termasuk mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Mengulas perjanjian kinerja Sekretariat Daerah serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target 2022, target perencanaan jangka menengah Renstra Setda, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Setda pada tahun 2022 termasuk catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Setda dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



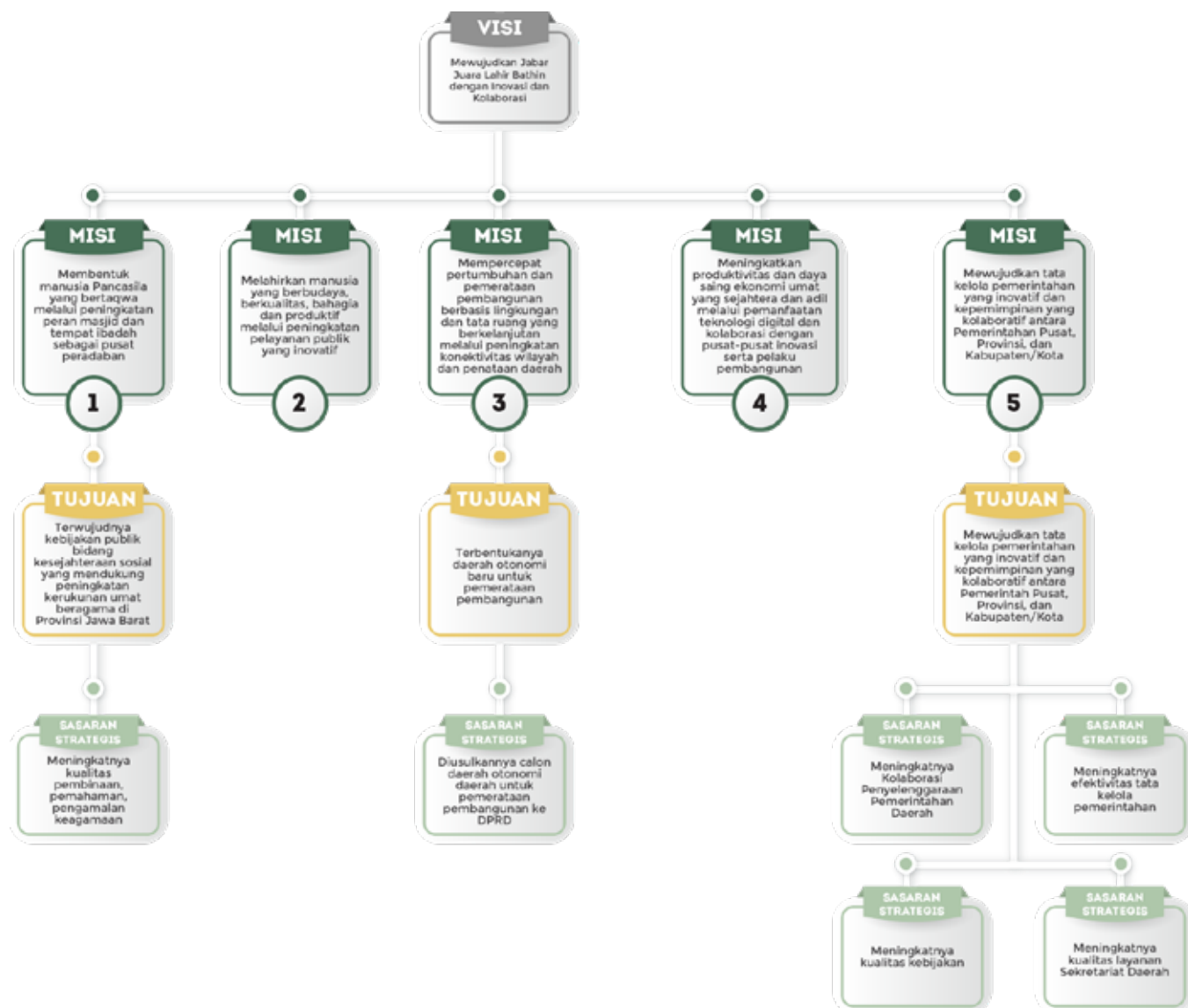


PERENCANAAN KINERJA

Secara umum, peran sekretariat daerah sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah pada penyediaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Secara spesifik, peran sekretariat daerah terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian tiga misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Misi Pertama yaitu 'Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban';
2. Misi Ketiga yaitu 'Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah'; dan
3. Misi Kelima yaitu 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH



Pada level sasaran strategis, sekretariat daerah mendukung empat sasaran strategis pembangunan Jawa Barat. Sasaran pertama adalah yang mendukung perwujudan Misi Pertama yaitu 'Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi'. Sasaran kedua merupakan sasaran yang mendukung terwujudnya Misi Ketiga yaitu 'Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan'. Lalu sasaran ketiga yaitu 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel' serta keempat yaitu 'Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif' merupakan milestone dalam perwujudan Misi Kelima.

Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target empat sasaran strategis pembangunan Jawa Barat tersebut, sekretariat daerah menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan ke dalam enam sasaran strategis sekretariat daerah dan 18 indikator kinerja utama (IKU) yang pencapaiannya merupakan kinerja dari kesembilan biro. Tujuan pertama merupakan dukungan bagi perwujudan sasaran strategis pada Misi Pertama. Kemudian tujuan kedua merupakan dukungan bagi perwujudan sasaran strategis pada Misi Ketiga. Terakhir, tujuan ketiga merupakan dukungan bagi perwujudan sasaran strategis pada Misi Kelima.

PERJANJIAN KINERJA

DENGAN TELAH DITETAPKANNYA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENCERMINKAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK TAHUN 2022, MAKA SASARAN DAN INDIKATOR TERSEBUT DITUANGKAN KE DALAM PERJANJIAN KINERJA. ADAPUN PERJANJIAN KINERJA DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (Target 85%) • Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (Target 90%) • Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan (Target 100%)
Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat (Target kategori "A") • Nilai Manajemen Perubahan (Target Nilai 3,55 Poin) • Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi (Target Nilai 4,06 Poin) • Nilai Penataan Tatalaksana (Target Nilai 3,30 poin) • Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Target nilai 4,18 poin) • Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (target nilai 80 poin) • Persentase Penataan Peraturan Perundang -Undangan dan Pemenuhan HAM (target 100%) • Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional (Target 3,344 poin) • Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum (Target 90%)
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan (Target Predikat Baik) • Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan (Target Predikat Baik) • Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda (Target Kategori B)
Meningkatnya kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti (target 80%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan (Target 85%)
Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis (Target 100%)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakanlah sejumlah 8 program, 28 kegiatan, dan 86 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya pengurangan pada belanja pada struktur anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga menjadi total **Rp.1.057.589.572.097,00**.

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp 570.571.594.939	Biro Kesejahteraan Rakyat
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 27.246.455.683	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 6.333.035.170	Biro Hukum dan HAM
4.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 7.507.113.830	Biro Perkeonomian, Biro BUMD, Investasi dan Adbang
5.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 797.888.680	Biro BUMD, Investasi dan Adbang
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 4.084.984.700	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Program Penataan Organisasi	Rp 2.844.564.298	Biro Organisasi
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 438.473.934.797	Semua Biro



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



DATA CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	85	98	115,29
		Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Persen	90	100	111,11
		Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	100
		Nilai Manajemen Perubahan	Poin	3,55	4,92	138,59
		Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Poin	4,06	7,09	174,63
		Nilai Penataan Tatalaksana	Poin	3,30	6,20	187,88
		Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Poin	4,18	6,23	149,04
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Poin	80	80,2	100,25
		Persentase Penataan Peraturan Perundang -Undangan dan Pemenuhan HAM	Persen	100	100	100
		Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Poin	3,344	3,520	100
		Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	100	111,11
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Kualifikasi	Baik	Sangat Baik	100
		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Sangat Baik	100
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Kategori	B	A	100
4	Meningkatnya kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	80	97,55	121,94
5	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	85	100	117,65
6	Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	100	100	100

Sasaran Strategis I

MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN

Meningkatnya Kualitas Kebijakan' merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban Setda dalam melaksanakan core competence-nya yaitu penyusunan kebijakan publik. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkualitas. Adapun fokus diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu pendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif sebagaimana Misi 5 Jawa Barat.

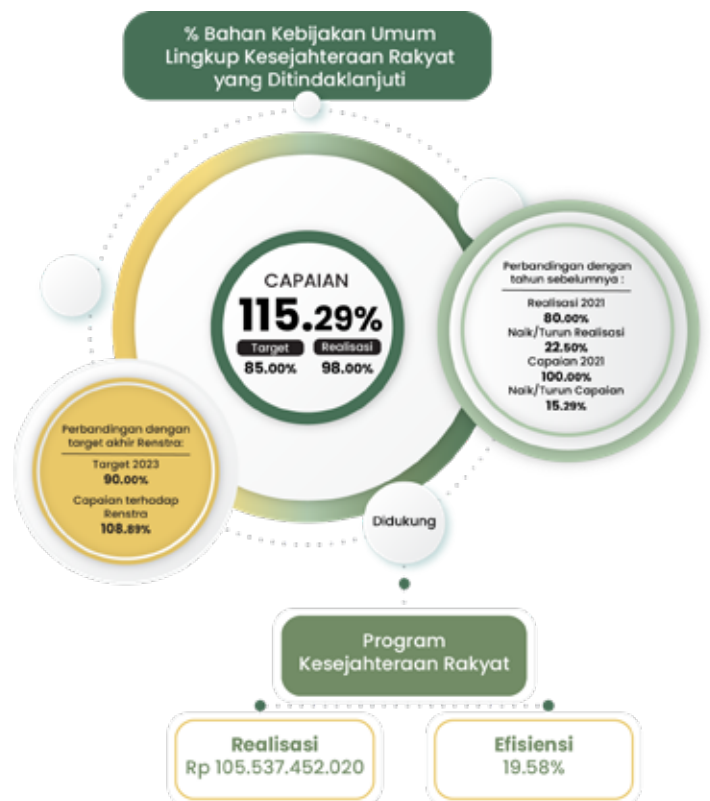
Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki tiga indikator yaitu: (1) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti; (2) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti, serta (3) Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan. Secara umum, ketercapaian kinerja tiga indikator tersebut adalah 108.8%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:



PERSENTASE BAHAN KEBIJAKAN UMUM LINGKUP KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI

Bahan kebijakan umum lingkup kesejahteraan yang ditindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum kesejahteraan rakyat yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

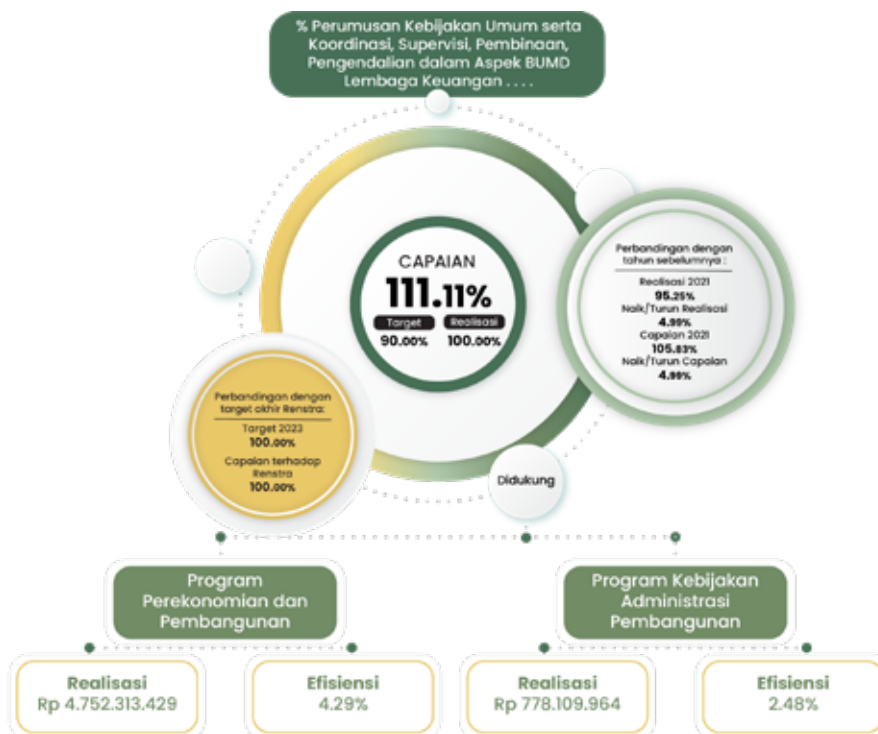
Kinerja ini, ditargetkan tercapai sebesar 85% dan dapat direalisasikan sebesar 98% sehingga kinerja di Tahun 2022 tercapai sebesar **115,29%**. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, kinerja meningkat sebesar **15,29** poin dari capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai **90%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.



Pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas agenda setting dan formulasi kebijakan dan juga kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas kajian serta kualitas monitoring kebijakan pada bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Adapun upaya-upaya untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pemenuhan penyusunan kajian kebijakan, komunikasi, serta pemantauan implementasi kebijakan di bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Ketercapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat dengan pagu anggaran sebesar **Rp131.239.175.364,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp105.562.547.716,00**. Dengan demikian kinerja penggunaan anggaran tercapai sebesar **80,44%** sehingga diperoleh efisiensi sebesar **19,56%** atau sebanyak **Rp25.676.627.648,00**. Pemanfaatan anggaran menghasilkan sembilan kebijakan yang terdiri dari satu peraturan gubernur, enam keputusan gubernur, satu surat edaran, dan satu instruksi gubernur. Adapun daftar Kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2022 disajikan dalam tabel pada lampiran.

Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti



Perumusan kebijakan lingkup BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan merupakan indikator yang menunjukkan bahwa rancangan kebijakan umum terkait BUMD, BLUD, investasi daerah, dan administrasi pembangunan yang disusun ditetapkan menjadi kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Selanjutnya, kinerja terkait perumusan kebijakan lingkup BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan ini, di Tahun 2022 ditargetkan dicapai sebesar 90% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian kinerja tercapai sebesar **111,11%**. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja meningkat sebesar **4,99%**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai sebesar 100%.

Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan BUMD, BLUD dan Investasi Daerah; meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dimensi pengukuran kinerja; serta meningkatnya kualitas evaluasi kemanfaatan kebijakan BUMD, BLUD dan Investasi Daerah. Pencapaian kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas kajian dan formulasi kebijakan, monitoring serta evaluasi kebijakan BUMD, BLUD dan Investasi Daerah. Melalui upaya-upaya yakni fasilitasi perumusan kajian kebijakan, formulasi kebijakan, pembentukan tim implementasi kebijakan, sosialisasi, pemantauan implementasi kebijakan serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan di BUMD Lembaga Keuangan dan Non Lembaga Keuangan, BLUD, serta Investasi Daerah.

Kondisi lainnya yang mendukung tercapainya kinerja tersebut yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dimensi pengukuran kinerja. Adapaun upaya untuk mencapai kondisi tersebut melalui pelaporan perkembangan pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota; pelaporan progress pekerjaan; evaluasi kegiatan serta penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah.



DARI TOTAL PRODUK KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN, DIPEROLEH 20 KEBIJAKAN YANG TERDIRI DARI EMPAT PERATURAN DAERAH, SATU PERATURAN GUBERNUR, 11 KEPUTUSAN GUBERNUR, DAN EMPAT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH.

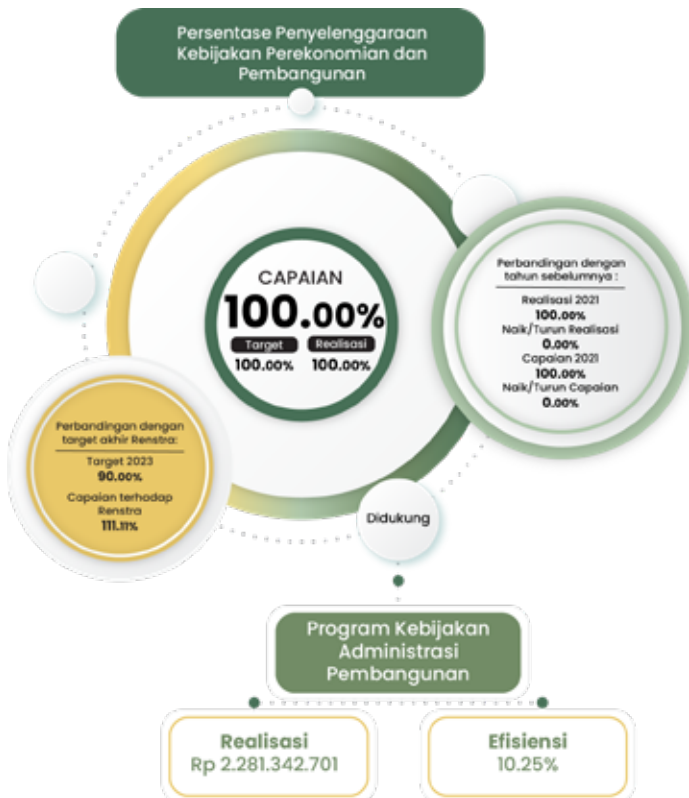
Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya yaitu optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Barat, diantaranya penetapan regulasi mengenai reformasi BUMD meliputi pembinaan terkait good corporate governance (GCG) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat; memfasilitasi kemitraan antar BUMD sebanyak enam BUMD; serta memastikan komitmen pengurus dan karyawan BUMD dalam menjalankan bisnis dengan menerbitkan surat pakta integritas sebanyak tiga pakta integritas.

Selain dari pada itu, dilakukan upaya optimalisasi dan peningkatan kontribusi BLUD terhadap PAD dan penataan BLUD untuk peningkatan akses pelayanan publik. Sampai dengan Tahun 2022, sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat 35 SMKN yang sudah ditetapkan untuk menerapkan BLUD dan 3 (tiga) UPTD dalam proses penilaian usulan Penerapan BLUD, yaitu UPTD UOBK Rumah Sakit Kesehatan Kerja (RSKK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (P3JB) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

Dari total produk kebijakan yang dihasilkan, diperoleh 20 kebijakan yang terdiri dari empat peraturan daerah, satu peraturan gubernur, 11 keputusan gubernur, dan empat surat edaran sekretaris daerah. Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan dua program. Pertama, Program Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki pagu anggaran sebesar **Rp 4.965.221.830,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp4.752.313.429,00** sehingga kinerja anggaran sebesar **95,71%**. Dari capaian tersebut diperoleh efisiensi sebesar **4,29%** atau **Rp212.908.401,00**. Selanjutnya, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang memiliki pagu sebesar **Rp797.888.680,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp778.109.964,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **97,52%**. Capaian tersebut memberikan efisiensi sebesar **2,48%** atau **Rp19.778.716,00**.

Pencapaian kinerja biro, berkontribusi terhadap perolehan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meraih penghargaan TOP Pembina BUMD tahun 2022 oleh TOP Business Magazine. Selain penghargaan tersebut, penghargaan lainnya yang juga turut diperoleh adalah Anugerah Aninata Syariah Award Tahun 2022 Juara 1 Kategori Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Juara 2 Kategori Industri Halal yang berasal dari Majalah Infobank.

PERSENTASE PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



Atas pencapaian tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Perekonomian telah meraih beberapa penghargaan yang berasal dari oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI diantaranya sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik Wilayah Jawa-Bali melalui Program Petani Milenial. Selain itu, Biro Perekonomian turut berkontribusi pada peraih penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lalu, turut juga berkontribusi pada perolehan penghargaan Kategori Program Pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh Merdeka Award 2022.

Keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.541.892.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp2.281.342.701,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **89,75%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **10,25%** atau **Rp260.549.299,00**. Adapun daftar Kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2022 disajikan dalam tabel pada lampiran.

Penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan merupakan indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang berkaitan dengan urusan perekonomian dan pembangunan Jawa Barat dirumuskan, diimplementasi, dan dievaluasi. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Untuk Tahun 2022, kinerja pada indikator ini ditargetkan tercapai sebesar 100% dan dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga kinerja tercapai sebesar 100%. Ketercapaian kinerja ini memperlihatkan adanya konsistensi dari Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target pada akhir Renstra Tahun 2023, kinerja tercapai 90%. Hal ini memperlihatkan bahwa progress kinerja sesuai rencana.

Peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas agenda setting dan formulasi kebijakan bidang perekonomian. serta meningkatnya kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian. Pencapaian kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas kajian dan formulasi kebijakan, monitoring serta evaluasi bidang perekonomian melalui upaya-upaya yakni fasilitasi perumusan kajian kebijakan, formulasi kebijakan, pembentukan tim implementasi kebijakan, sosialisasi, pemantauan implementasi kebijakan serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan di bidang sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian

Sasaran Strategis II

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran kedua ini, berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berkualitas baik. Adapun fokus ruang lingkup di dalamnya mencakup penyelenggaraan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui fasilitasi administrasi pemerintahan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui kontribusinya turut berhasil mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah Jawa Barat yang smart, bersih, dan akuntabel. Hal ini diperlihatkan melalui perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar **80,70** atau kategori "A". Nilai tersebut meningkat pesat dari tahun sebelumnya dan menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu dari tiga provinsi di Pulau Jawa dengan IRB A disamping Jawa Tengah dan Jawa Timur. Capaian IRB Provinsi Jawa Barat di Tahun 2022 sudah sangat istimewa yaitu meningkat **100,86%** dari target. Capaian kinerja ini juga berhasil meningkat **2,61%** dari tahun sebelumnya. Capaian ini juga membawa kepada pencapaian target akhir RPJMD yaitu sebesar **97,23%**.





PENCAPAIAN RB KABUPATEN/KOTA

Keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya dilihat dari peningkatan kinerja implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah. Pada Tahun 2022, progres capaian implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat ada pada 68,17% dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu, capaian meningkat sebanyak 15,32 poin. Selain itu, progres capaian implementasi reformasi birokrasi juga turut terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota, hal ini merupakan wujud pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membina dan mengakselerasi RB di kabupaten/kota. Berdasarkan data pada tahun 2022, terdapat sebanyak 3 kabupaten kota yang meraih kenaikan kategori reformasi birokrasi dari "B" ke "BB" diantaranya yaitu Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sementara itu, terdapat 1 (satu) pemerintah kabupaten/kota yang meraih kenaikan kategori dari "CC" ke "B" yaitu Pemerintah

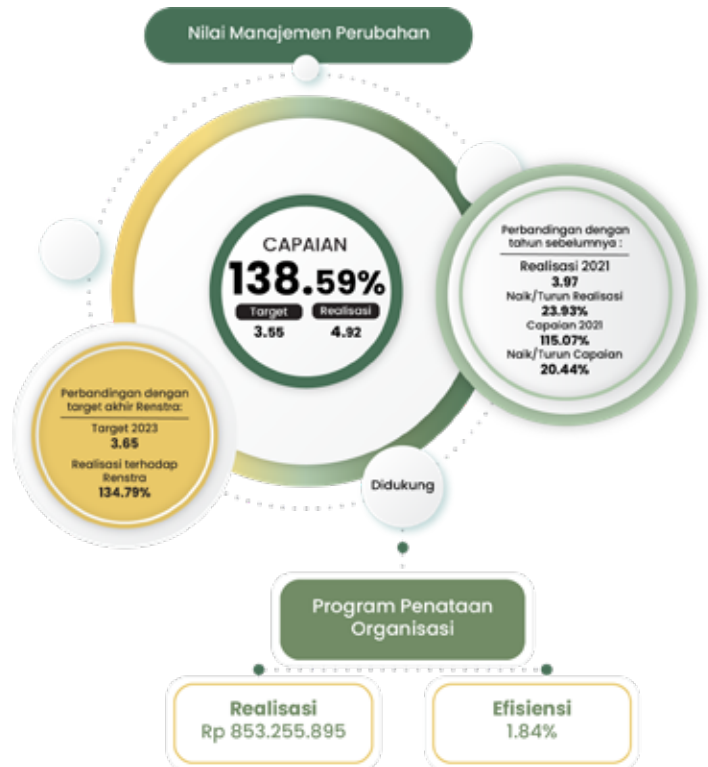
PENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN

Kemajuan pelaksanaan reformasi di 8 (delapan) area perubahan, yang mana terdapat enam area diantaranya yang merupakan hasil dari pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit yang mengkoordinir kinerja perangkat daerah. Enam area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana dengan fokus pada mekanisme kerja dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Pencapaian kinerja pada enam area tersebut diperoleh melalui hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro Organisasi. Sementara itu pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa diperoleh dari hasil evaluasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan untuk pemastian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam ruang lingkup fasilitasi administrasi pemerintahan umum dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilakukan melalui penilaian hasil fasilitasi baik kepada perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Adapun perolehan capaian indikator kinerja utama setda dari masing-masing area tersebut dijelaskan pada uraian di bawah ini.

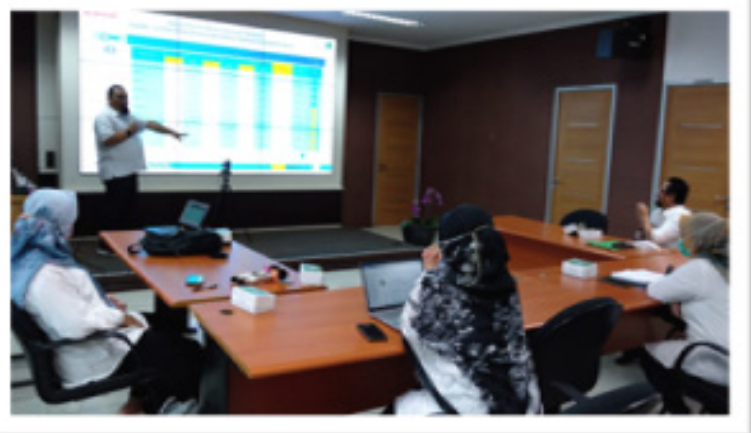
NILAI MANAJEMEN PERUBAHAN

Pada area manajemen perubahan, Keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilihat dari tingkat inovasi yang meningkat. Di tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil memperoleh penghargaan pada Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Provinsi Terinovatif dengan Predikat Sangat Inovatif dan mendapatkan nilai 69,15.

Keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan hasil dari upaya-upaya perubahan yang dilakukan. Hasil penilaian mandiri, Nilai Manajemen Perubahan dapat terealisasi sebesar 4,92 poin atau tercapai 138,59% dari target. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian meningkat sebanyak 20,44%.



Adapun pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh terjadinya continuous improvement reformasi birokrasi serta budaya kerja yang diterapkan secara efektif oleh perangkat daerah; kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas pembinaan kabupaten/kota di Jawa Barat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui upaya pembinaan kabupaten kota di Jawa Barat tentang penerapan reformasi birokrasi. Kondisi lainnya yakni meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam implementasi budaya kerja melalui penyusunan dan sosialisasi kamus kompetensi nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui multimedia; serta evaluasi budaya kerja. Terakhir yakni kondisi tersebut didorong oleh terevaluasinya implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah melalui penyusunan juknis implemetasi Rb; pembangunan sistem RB terintegrasikan; publikasi dan sosialisasi implementasi RB pada perangkat daerah; serta pemantauan perangkat daerah dalam memenuhi kelengkapan dokumen pelaksanaan RB.





Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai kondisi di atas adalah dilakukannya asistensi, monitoring, dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Salah satunya dengan disusun dan disosialisasikannya Kamus Kompetensi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK serta evaluasi budaya kerja organisasi untuk mendorong perubahan mindset dan culture set ASN Provinsi Jawa Barat. Upaya substantif lainnya adalah dengan melakukan perubahan terhadap struktur dan sasaran tim kerja reformasi birokrasi menjadi lebih operasional sehingga perbaikan dan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi RB Tahun 2021 dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik.

Kemudian dilakukan pula pembangunan sistem informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yaitu aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasikan) yang dilengkapi dengan petunjuk teknis implementasi Reformasi Birokrasi. Selain itu, sosialisasi strategi implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat

Pencapaian pengembangan manajemen perubahan tersebut didukung oleh Program Penataan Organisasi dan menyerap anggaran sebesar **98,20%**, atau realisasi sebesar **Rp853.255.895,00**. dari rencana alokasi sebesar **Rp868.939.602,00**. Kinerja fisik pada ketiga sub kegiatan tersebut mencapai **100%**, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar **1,84%**.

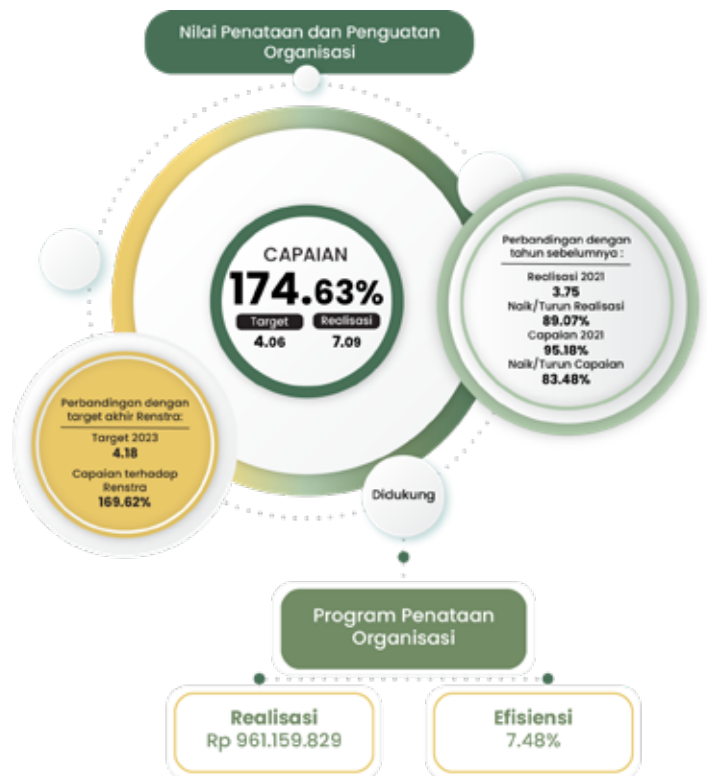
KEBERHASILAN PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, MERUPAKAN HASIL DARI UPAYA-UPAYA PERUBAHAN YANG DILAKUKAN.

NILAI PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Pencapaian terbaik Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat di tahun 2022, turut didukung oleh pencapaian nilai penataan dan penguatan organisasi yang berhasil meraih nilai **7,09** poin. Dibandingkan dengan target, kinerja tercapai cukup tinggi yaitu sebesar **174,63%**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, perolehan tersebut meningkat sebanyak **83,48%**. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh terwujudnya agile organization.

Perwujudan kondisi tersebut didorong oleh kondisi jabatan di Pemprov Jabar yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya melalui upaya penyusunan kelas jabatan; penyusunan strander kompetensi jabatan; penyusunan probis aplikasi anjab ABK dan peta jabatan 5 tahun berdasarkan Anjab ABK; serta penyusunan formasi jabatan fungsional perangkat daerah. Kondisi lainnya yakni berubahnya susunan perangkat daerah berbasis kinerja melalui upaya penyusunan design susunan perangkat daerah berbasis kinerja; penyusunan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; serta penyusunan laporan kelembagaan evaluasi UPTD. Selain itu, didorong pula oleh kondisi hubungan kerja yang fleksibel melalui penyusunan display peta tatahubungan kerja pada aplikasi TRK; dan evaluasi implementasi hubungan kerja yang sesuai pedoman. Terakhir yakni kondisi tersusunnya organisasi perangkat daerah sebanyak 2 level, melalui upaya penyusunan design susunan organisasi perangkat daerah dengan 2 level.

Peningkatan nilai secara signifikan ini didorong oleh beberapa upaya dalam menata kelembagaan provinsi. Salah satu upaya yang merupakan tindak lanjut arahan presiden dalam melakukan penyederhanaan birokrasi adalah penyederhanaan struktur sebanyak 1.360 jabatan. Upaya ini diiringi oleh penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional fase kedua di Tahun 2022 sebanyak 876 jabatan serta diikuti oleh penyesuaian tugas pokok dan fungsi.



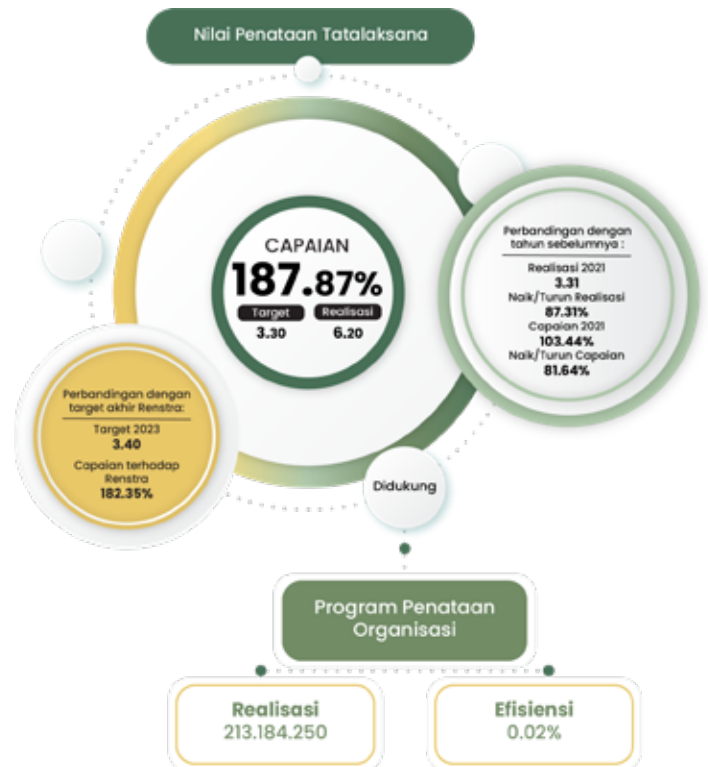
Disamping itu, dilaksanakan pula reviu struktur perangkat daerah yang didasarkan kepada arsitektur kinerja ditandai dengan terlaksananya pembahasan RAPERDA penataan perangkat daerah bersama DPRD. Dilakukan pula penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di 38 perangkat daerah serta cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Upaya-upaya tersebut didukung oleh pembiayaan sebesar **Rp961.159.829,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp1.033.097.250,00** melalui Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Dari sisi kinerja, pemanfaatan anggaran tercapai **93,04%**. Sehingga dapat dilakukan efisiensi sebesar **7,48%** atau **Rp71.937.421,00**.

NILAI PENATAAN TATA LAKSANA

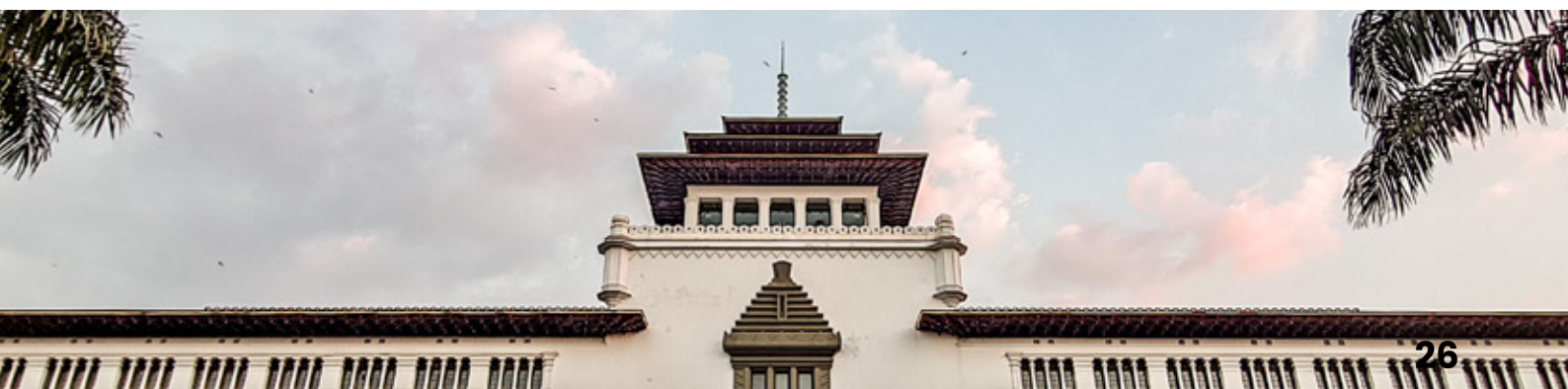
Reformasi Birokrasi Jawa Barat yang berkualitas turut didorong oleh kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada pencapaian IKU Nilai Penataan Tata Laksana melalui upaya perbaikan pada mekanisme kerja provinsi dan perangkat daerah dalam hal proses bisnis/tata kerja untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Realisasi kinerja untuk tahun 2022, diperoleh nilai 6,20 poin. Capaian ini memperlihatkan kinerja signifikan sebesar **187,87%** dibandingkan target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, kinerja meningkat sebanyak **81,64%**.

Adapun capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh terjadinya sistem kerja yang dinamis yang telah diterapkan di setiap perangkat daerah. Perwujudan kondisi tersebut didorong oleh adanya peta proses bisnis kinerja yang mendorong terbentuknya organisasi berbasis kinerja melalui upaya penyusunan peta broses bisnis sampai dengan lintas fungsi beserta SOP yang mengarah pada prosedur kerja berbasis elektronik di 38 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; pembinaan dan evaluasi peta proses bisnis kabupaten/kota dan perangkat daerah; penyusunan dan evaluasi SOP perangkat daerah. Kondisi sistem kerja dinamis tersebut pula didorong oleh kondisi adanya standar kerja yang mengatur seluruh proses kinerja secara komprehensif, melalui upaya penyusunan kebijakan sarana dan prasarana kerja; penyusunan kebijakan pakaian dinas, kebijakan TNDE; pembinaan kabupaten/kota tentang standar kerja dan prosedur kinerja Provinsi Jawa Barat khususnya dalam hal peraturan pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Terintegrasi.



Juga penetapan peraturan mengenai prosedur kerja sederhana perihal waktu kerja dan lokasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

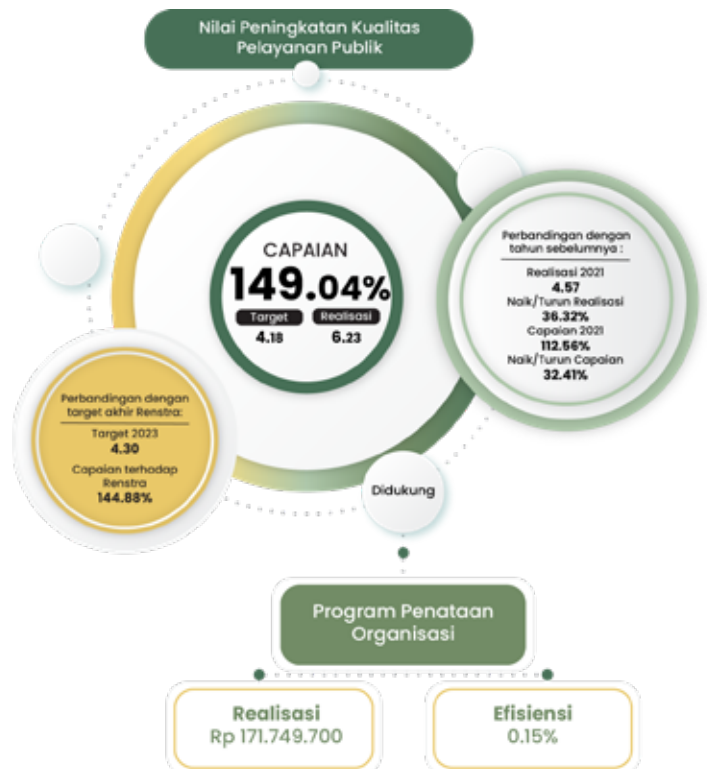
Kinerja yang telah dihasilkan di atas, dicapai melalui pemanfaatan anggaran melalui Program Penataan Organisasi dengan realisasi sebesar **Rp213.184.250,00** dari total anggaran **Rp213.220.250,00**. Dengan ini kinerja anggaran tercapai sebesar **99,98%**. Dari kinerja tersebut, anggaran dapat diefisiensi sebesar **0,02%**.



NILAI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Aspek peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu pendorong keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini diperlihatkan dari peraih Predikat Kepatuhan Tertinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 berdasarkan penilaian Ombudsman RI dimana nilai yang diperoleh sebanyak **88,46** poin meningkat signifikan sebanyak **24,62** poin dibandingkan dengan tahun lalu.

Penilaian tidak hanya dilakukan oleh Ombudsman RI namun juga berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, aspek kualitas pelayanan publik turut memperoleh kenaikan poin di Tahun 2022 yaitu dengan nilai **4,62**, meningkat sebanyak 0,05 poin dibandingkan Tahun 2021. Di sisi lain, berdasarkan evaluasi PMPRB Provinsi Jawa Barat untuk nilai peningkatan kualitas pelayanan publik mendapatkan realisasi **6,23** poin melampaui target sebanyak **149%**. Lalu, apabila dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja meningkat sebanyak **32,41%**.



Capaian kinerja indikator tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerapan kebijakan pelayanan publik. Perwujudan kondisi tersebut telah didorong oleh proses bisnis pelayanan public perangkat daerah yang sederhana melalui upaya penyusunan probis pelayanan public perangkat daerah termasuk penyusunan database jenis layanan publiknya. Kondisi lainnya didorong oleh evaluasi kebijakan pelayanan public yang mendorong kualitas pelayanan public melalui upaya pelaksanaan forum konsultasi public; pembangunan aplikasi survey kepuasan masyarakat terintegrasi; dan evaluasi standar pelayanan di perangkat daerah dan kabupaten/kota. Terakhir yakni kondisi meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan melalui penyusunan Pergub pedoman penyusunan standar pelayanan dan pelaksanaan sosialisasinya kepada perangkat daerah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kondisi tersebut diantaranya adalah fasilitasi 38 perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat dalam melakukan digitalisasi pelayanan publik yang dimulai dari pemenuhan standar layanan unit pelayanan.

Selain itu, pendudukan pembangunan portal layanan Jabar terintegrasi (jabarprov.go.id) dan Super Apps Jabar.

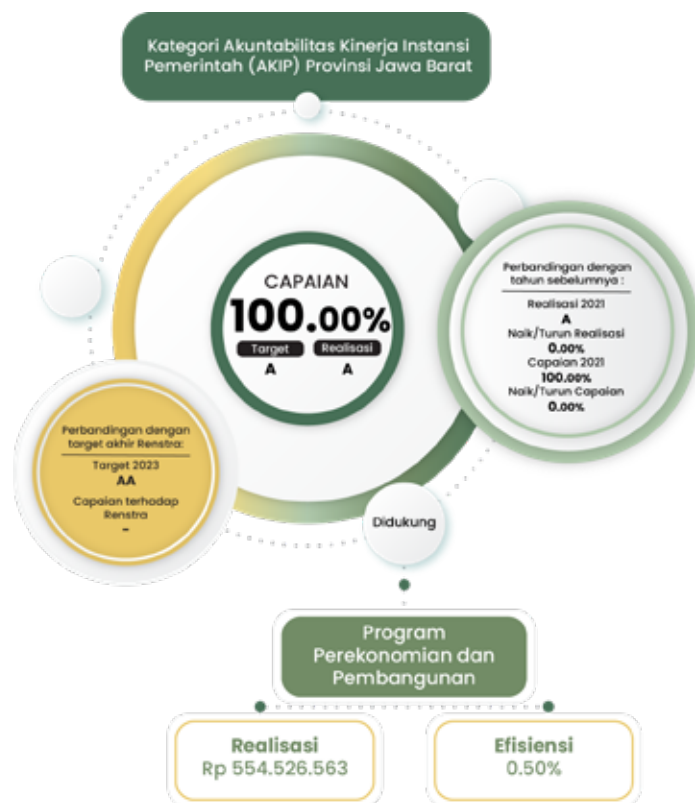
Dilakukan pula upaya dalam mengakselerasi perangkat daerah untuk melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan. Alhasil, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI di Tahun 2022 pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat berhasil memasuki zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi.

Upaya pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan pemanfaatan anggaran sebesar **Rp171.749.700,00** dari pagu **Rp172.003.000,00**. Dengan demikian, kinerja anggaran diperoleh sebesar **99,85%** dan dapat dilakukan efisiensi sebesar **0,15%** atau **Rp253.300,00**.

KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PROVINSI JAWA BARAT

Pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi “A” di Jawa Barat, tidak terlepas dari dukungan aspek akuntabilitas kinerja. Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sudah memasuki kategori ‘A’ dengan interpretasi ‘memuaskan’. Khususnya pada evaluasi AKIP tahun 2021 dan 2022, peningkatan pesat AKIP terjadi dari **81,28** poin menuju **85,01** poin meningkat sebanyak **3,73** poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka tercapai **111,11%**. Provinsi Jawa Barat berada diposisi ke-6 diantaranya Pemerintah Daerah se-Indonesia yang memperoleh Predikat A.

Meningkatnya efektivitas tata Kelola pemerintahan dimensi akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan arsitektur kinerja dalam sinergitas manajemen kinerja, ketatalaksanaan dan kelembagaan, meningkatnya efektivitas pembinaan SAKIP Kabupaten/kota di Jawa Barat, dan tata Kelola akuntabilitas kinerja mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.



Pencapaian kondisi-kondisi tersebut, tercipta dari :

1. LKIP Pemerintah Daerah informatif dan bermanfaat, dengan upaya pendampingan penyusunan dan verifikasi perjanjian kinerja, dokumen LKIP perangkat daerah;
2. Kondisi perangkat daerah yang berkinerja baik menerima apresiasi melalui upaya pembangunan fitur raport kinerja pada aplikasi E-Sakip (interoperabilitas TRK)
3. Kondisi adanya inisiatif strategis peningkatan SAKIP berkualitas melalui penyusunan inisiatif strategis peningkatan SAKIP;
4. Kondisi arsitektur kinerja dimanfaatkan untuk pengendalian manajemen kinerja pada aplikasi E-Sakip melalui upaya pembangunan rancangan fitur penjenjangan kinerja di aplikasi E-SAKIP;
5. Kondisi seluruh ASN Jabar berkampanye kinerja via aplikasi melalui fitur kampanye kinerja di E-Sakip;
6. Kondisi diusulkannya kajian kesesuaian perencanaan kinerja pada E-Sakip dengan SIPD ke Bappeda;
7. Kondisi arsitektur kinerja pada aplikasi E-Sakip dimanfaatkan untuk penyusunan SKP secara otomatis.



Hal-hal yang telah diupayakan dalam pencapaian kondisi tersebut diantaranya penyusunan arsitektur kinerja pembangunan yang berdasarkan pemetaan masalah, landasan teori dan normatif. Pada tahun 2021 hingga 2022, sebanyak 38 perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan konsep tersebut dalam perencanaan kerjanya, yang kemudian menjadi pedoman manajemen kinerja terintegrasikan institusi dengan individu. Pengintegrasian manajemen kinerja institusi dengan manajemen kinerja individu tersebut, dilakukan melalui interoperabilitas aplikasi E-SAKIP dan TRK sehingga akan terlihat keterhubungan antara pencapaian kinerja institusi didukung dengan pencapaian kinerja individu.

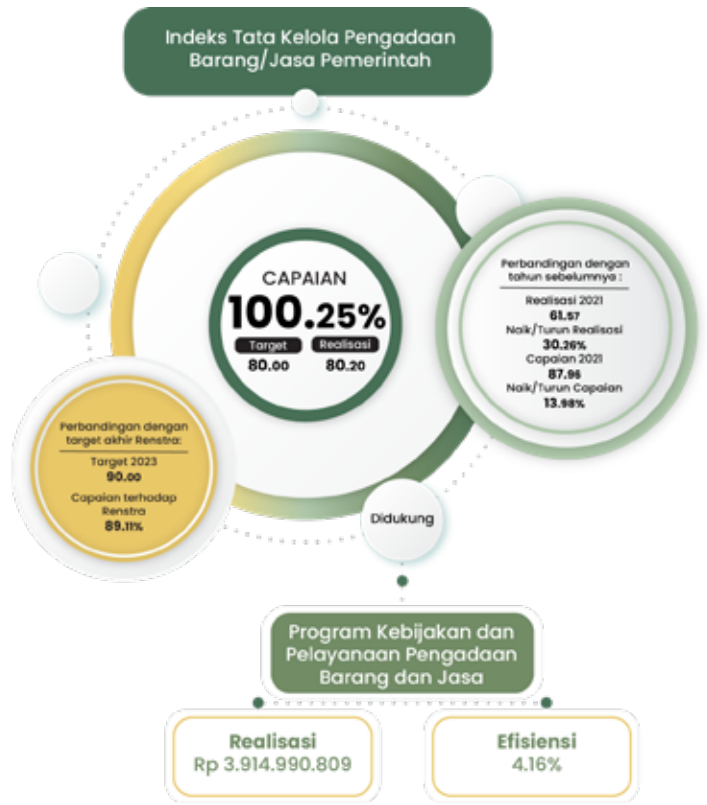
Lebih spesifik, pada informasi ketercapaian kinerja institusi akan terlihat melalui fitur Rapot kinerja di E-SAKIP dan kemudian terhubung dengan informasi capaian kinerja individu di TRK yang kemudian akhirnya dapat mendorong penerapan budaya pemberian reward individu melalui mekanisme employee of the month yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini.

Program yang secara langsung mendukung pencapaian target peningkatan akuntabilitas kinerja adalah Program Penataan Organisasi yang diampu oleh Biro Organisasi melalui kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Ada pun pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebesar **Rp557.304.196,00**. Pemanfaatan anggaran terealisasi sebesar **Rp554.526.563,00** sehingga kinerja anggaran tercapai **99,50%**. Pemanfaatan anggaran tersebut mendorong ketercapaian seluruh target output yang direncanakan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar **0,50%** atau **Rp2.777.633,00**.

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pada tahun 2022, hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) terhadap Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperoleh nilai sebesar 80,2 poin yang sebelumnya ditargetkan 80 poin. Sehingga capaian kinerja indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 100,25%. Apabila dibandingkan dengan level nasional, Jawa Barat berada di atas Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 65,7 point dan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 78,9 point.

Sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan kinerja, Pencapaian terhadap indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan barang dan jasa berbasis elektronik didukung dengan kondisi Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan Barang dan jasa, melalui upaya pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa provinsi di setiap perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barjas termasuk sistem pengadaan barang/jasa.





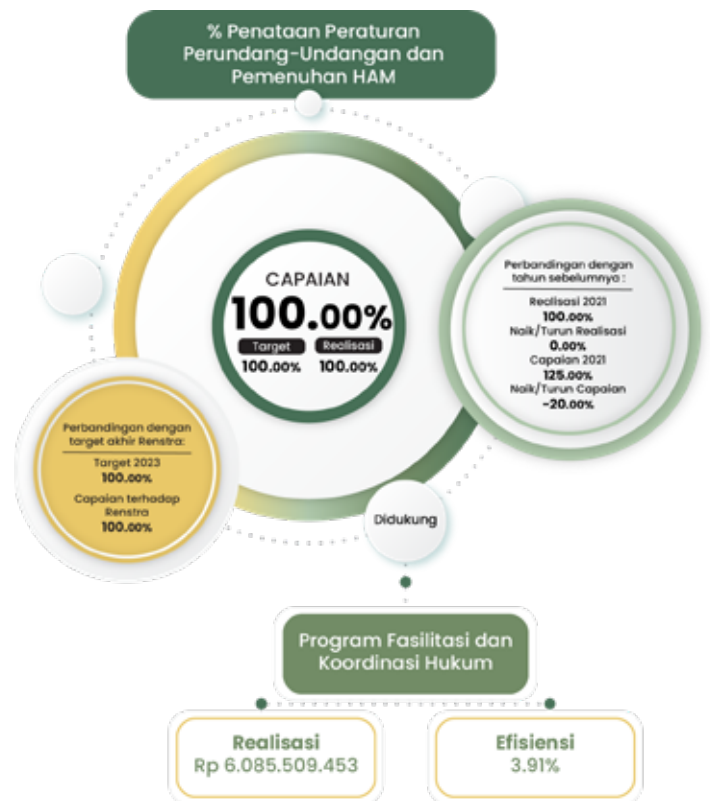
Kondisi lainnya yakni meningkatnya pemahaman kabupaten/kota dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan upaya pembinaan kabupaten kota. Selanjutnya, yakni kondisi meningkatnya kualitas layanan advokasi pengadaan barjas melalui penanganan permasalahan pengadaan barjas. Ditambah lagi dengan kondisi meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pengadaan diantaranya melalui upaya penyediaan data pengadaan barjas; penyusunan rencana pengembangan sistem barjas; penyebaran informasi pengadaan barjas pada kanal informasi public; pelayanan permohonan pembuatan akun pengguna SPSE; penanganan pengaduan sistem pengadaan barjas. Terakhir yakni didorong oleh penciptaan kondisi meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan barjas; pendampingan perangkat daerah dalam mengelola kontrak pengadaan barjas; penyusunan katalog elektronik lokas; penyusunan strategi pengadaan barjas; penyediaan rekomendasi paket pengadaan barjas; penyusunan kajian terkait sistem insentif dan anjab ABK untuk personel UKPBJ; pengukuran kinerja pengadaan barjas; serta penyusunan rencana kegiatan dan program prioritas peningkatan kematangan UKPBJ.

Upaya-upaya nyata diwujudkan diantaranya menambah jumlah SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa melalui rekrutmen PNS yang mempunyai potensi menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 17 orang dan mengadakan rekrutmen Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Instansi diluar Pemprov Jawa Barat melalui manajemen talenta sebanyak 1 orang. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan pengisian RUP, pencatatan SPSE, dan tata cara belanja melalui e-purchasing kepada 46 Perangkat Daerah/ Biro baik secara offline maupun online melalui Zoom Meeting PBJ Menyapa. Upaya selanjutnya adalah membuat surat edaran kepada 46 Perangkat Daerah/Biro untuk pengisian RUP, pencatatan SPSE dan peningkatan transaksi melalui e purchasing serta dengan menambah etalase katalog elektronik lokal.

Keberhasilan pencapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp4.084.984.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.914.990.809,00. Dengan demikian kinerja anggaran tercapai sebesar 95,84%. Pemanfaatan ini mendorong terjadinya efisiensi anggaran sebesar Rp169.993.891,00 atau sebesar 4,16%.

PERSENTASE PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMENUHAN HAM

Keberhasilan pencapaian efektivitas tata Kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat juga didorong oleh peningkatan kualitas pada aspek penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Pada aspek ini, instansi pemerintah diamanatkan untuk menghilangkan peraturan yang dapat menghambat perkembangan birokrasi serta mempercepat pelayanan. Penerapan deregulasi kebijakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui kinerja Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui fasilitasi penetapan kebijakan dan produk hukum daerah serta harmonisasi produk-produk hukum daerah dengan indikator persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.



Untuk Tahun 2022, kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat tertata. Indikator persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM tercapai sangat baik yaitu sebesar 100%. Walaupun tidak mengalami peningkatan dari kinerja tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Setda Tahun 2023, kinerja diperoleh sebesar 100%.

Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan jumlah pagu sebesar **Rp6.333.035.170,00** yang termanfaatkan sebesar **Rp6.085.509.453,00**. Realisasi ini memperlihatkan kinerja anggaran sebesar **96,09%** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp247.525.717,00** atau **3,91%**.

Pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh :

1. Meningkatnya kualitas layanan bantuan hukum; yang diwujudkan melalui kondisi meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat melalui upaya fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kondisi lainnya yaitu meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat melalui klarifikasi pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pemda Jabar. Kondisi lainnya yaitu meningkatnya kualitas penanganan perkara Gubernur/Wakil Gubernur dan pejabat/organisasi perangkat daerah melalui upaya penanganan perkara perdata Gubernur/Wagub/dan Pejabat/organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; kemudian upaya mediasi pendampingan hukum; serta penanganan perkara TUN Gubernur/Wakil Gubernur dan pejabat/organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

SASARAN II

2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang didorong oleh meningkatnya desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Barat melalui pembinaan kesadaran hukum desa/kelurahan melalui lomba. Kondisi lainnya yakni didorong oleh meningkatnya kapasitas Pemda Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan produk hukum melalui upaya pembinaan peserta dari pemerintah kab/kota dalam penyebaran informasi hukum. Terakhir yakni penciptaan kondisi yang didorong meningkatnya akses terhadap hukum Provinsi Jawa Barat melalui upaya tersebarnya dokumentasi informasi hukum Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat.
3. Meningkatnya pemenuhan HAM yang didorong oleh kondisi Terkendalnya penerapan rencana aksi HAM melalui upaya sosialisasi, implementasi kepada Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat serta pembentukan Tim Ranham Jawa Barat.
4. Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang harmonis didorong oleh kondisi meningkatnya kualitas rekomendasi produk hukum kabupaten/kota melalui upaya penyusunan kajian pra-rancangan, evaluasi rancangan serta klarifikasi kebijakan produk hukum daerah kabupaten/kota. Kondisi lainnya yaitu meningkatnya kualitas dan kererkaitan produk hukum melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah; penyusunan rancangan keputusan dan peraturan gubernur yang harmonis; penyusunan penyalarsan naskah akademik rancangan peraturan daerah provinsi dan perangkat daerah pemrakarsa; serta penyusunan analisis kebutuhan produk hukum daerah. Terakhir adalah kondisi direvisinya produk hukum provinsi Jawa Barat yang tidak harmonis yang diwujudkan melalui upaya penyusunan kajian terkait permasalahan hukum serta pemetaan produk hukum yang tidak harmonis dan memerlukan revisi.

Dari sisi output, kinerja dalam fasilitasi penetapan produk hukum provinsi menghasilkan 1.085 produk hukum yang terdiri dari 10 peraturan daerah (Perda). Antara lain yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum BUMD, pengelolaan keuangan daerah, dan Desa Wisata. Kemudian, 160 peraturan gubernur (Pergub) dan 915 keputusan gubernur (Kepgub). Sementara itu pada fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada), serta eraturan DPRD pada pemerintah kabupaten/kota, dihasilkan 230 Raperda, 413 Raperkada, dan tujuh Peraturan DPRD. Adapun jumlah produk hukum pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi berjumlah 94 produk

Disamping pencapaian pada penetapan kebijakan dan produk hukum daerah, ketercapaian target kinerja diperlihatkan dari adanya peningkatan akses masyarakat terhadap produk hukum dan informasi hukum. Di Tahun 2022, pengunjung website JDIIH Provinsi Jawa Barat berjumlah 111.297 pengunjung. 418% melebihi target pengunjung sebesar 26.620 pengunjung. Berkat capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik ke-3 dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada aspek HAM, pencapaian kinerja diperlihatkan melalui peningkatan kualitas layanan bantuan hukum berupa penanganan perkara pejabat negara dan pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 29 Perkara Litigasi dan 23 Perkara Non Litigasi.



Selain itu pada peningkatan pemenuhan HAM dilakukan penciptaan tanggap persoalan hukum masyarakat desa dan penyediaan akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebanyak 30 perkara bantuan hukum. Atas upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI berupa pemberian penghargaan atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di tingkat pemerintah daerah[PLI] pada Desember 2022.

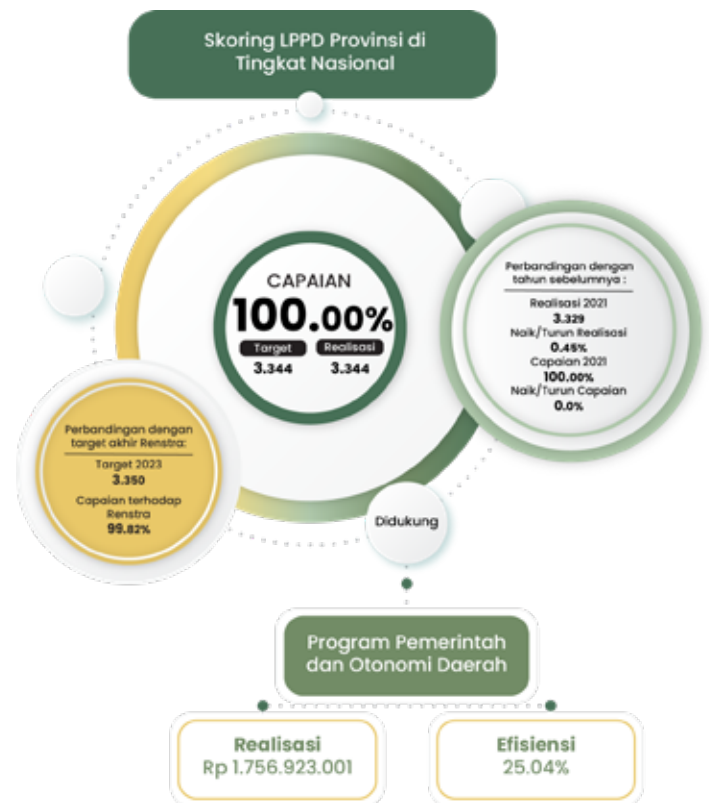
Disamping itu, telah dibangun sebuah sistem yang memberikan kemudahan dalam proses pengajuan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan telah beroperasi selama Tahun 2022. Atas upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil memperoleh penghargaan dalam pengelolaan Sistem Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa terkait dengan Kelurahan Sadar Hukum dari kementerian yang sama.



SKORING LPPD PROVINSI DI TINGKAT NASIONAL

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah.

Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skoring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.



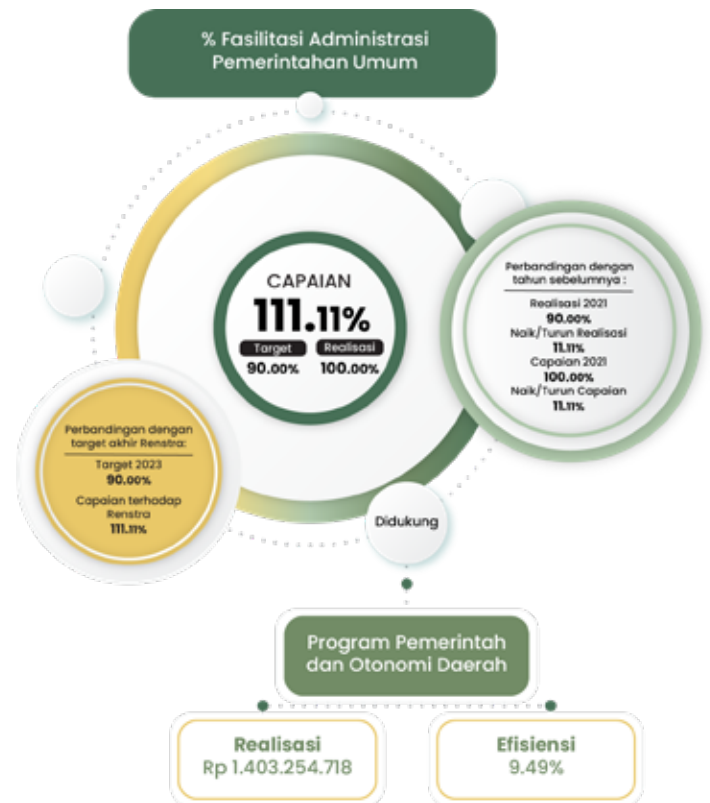
Pada Tahun 2022, pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan perolehan skoring LPPD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,520 yang ditargetkan 3,344 dan memperlihatkan bahwa kinerja dapat tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diperoleh pertumbuhan sebesar 45% dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Setda, kinerja tercapai 99,82%. Perolehan skoring LPPD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, menempati peringkat ke-5 level nasional dengan status tinggi.

Meningkatnya kualitas LPPD Provinsi Jawa Barat didukung oleh meningkatnya penerapan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memperlihatkan kinerja perangkat daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) oleh enam perangkat daerah. Pencapaian pada kondisi-kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui penyusunan dokumen LKPJ, Standar Pelayanan Minimal, LPPD Provinsi Jawa Barat, serta dokumen evaluasi kinerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Adapun, anggaran pendukung pelaksanaan kinerja pada indikator ini ditetapkan sebesar **Rp2.343.854.036,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp1.756.923.001,00**. Sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **74.96%** dan diperoleh efisiensi sebesar **25,04%** atau **Rp586.931.035,00**.

PERSENTASE FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

Kinerja fasilitasi administrasi pemerintahan umum mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti penegasan batas wilayah, penyusunan bahan toponimi dan pemetaan wilayah provinsi, bahan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar daerah dan data wilayah administrasi pemerintahan dan penyelesaian konflik antar kabupaten/kota, serta pelayanan administratif bidang otonomi daerah meliputi pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan. Dengan demikian Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.



Pada pencapaian kinerja di tahun 2022, apabila dibandingkan target, realisasi tercapai 100% sehingga kinerja tercapai sebesar 111,11%. Capaian tersebut dihitung dari jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum yang difasilitasi dibandingkan dengan permohonan fasilitasi pemerintahan umum yang diajukan ke provinsi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya kinerja meningkat sebesar 11,11%. Peningkatan juga terlihat apabila dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra yaitu diperoleh capaian sebesar 111,11% atau sudah terealisasi 90% dari target akhir Renstra. Dengan demikian, maka Setda optimis kebutuhan pemenuhan administrasi pemerintahan umum baik milik provinsi maupun kabupaten/kota dapat difasilitasi secara baik hingga tahun 2023.

Adapun keberhasilan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kepala Daerah wakil kepala daerah dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui beberapa upaya yaitu fasilitasi administrasi kepala daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pemberhentian, pengangkatan, dan pensiun pada Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bandung.



Fasilitasi administrasi juga dilakukan pada permohonan-permohonan ijin dengan alasan penting. Secara total, fasilitasi dilakukan sebanyak 31 kali. Selanjutnya, dilakukan pula fasilitasi administrasi kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara total dilakukan sebanyak 55 kali. Upaya lain yakni terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Selain pelayanan Administrasi kepada Kepala Daerah, pencapaian didukung pula oleh kondisi meningkatnya pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah melalui upaya pembinaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah serta terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi kabupaten/kota terhadap kinerja kecamatan. Pencapaian kondisi lainnya yakni meningkatnya kualitas tata Kelola urusan melalui tersusunnya kajian peningkatan kapasitas kepala daerah.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan pagu anggaran **Rp1.550.418.046,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp1.403.254.718,00**. Sehingga kinerja anggaran tercapai **90,51%**. Adapun efisiensi anggaran diperoleh sebesar **9,49%** atau setara dengan **Rp147.163.328,00**.

Sasaran Strategis III

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja inti didukung dengan kondisi internal yang kondusif. Bahwa layanan yang diberikan kepada internal setda akan berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja yang mendukung pembangunan Jawa Barat. Capaian sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator indeks kepuasan pengguna layanan internal Sekretariat Daerah yang terdiri dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda oleh Biro Umum, Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan, dan Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan oleh Biro Administrasi Pimpinan.



KUALIFIKASI KEPUASAN LAYANAN PIMPINAN

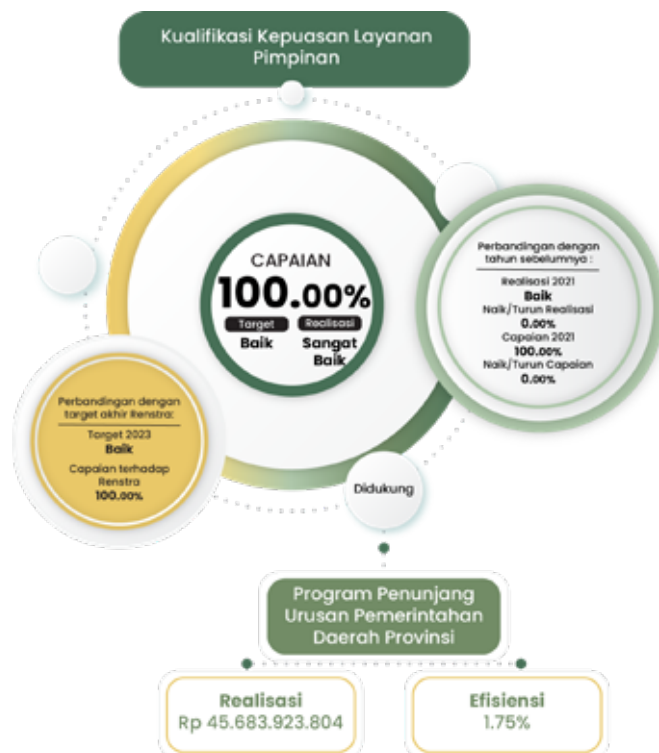
Kualifikasi kepuasan layanan pimpinan menunjukkan tingkat kepuasan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah) terhadap layanan yang diberikan. Adapun Kualifikasi kepuasan layanan pimpinan diperoleh melalui hasil survey kepuasan terhadap layanan kerumahtanggaan dan materi komunikasi pimpinan dengan metode berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Realisasi kualifikasi kepuasan layanan pimpinan pada Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 'Sangat Baik' dengan nilai 94.43 poin.

Hasil ini diperoleh melalui survey yang dilakukan melalui aplikasi skm.jabarprov.go.id yang dibangun Biro Organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk anggaran yang direalisasikan untuk mendukung indikator kinerja utama ini adalah sebesar **Rp45.683.923.804,00** atau sebesar **98,25%** dari pagu anggaran sebesar **Rp46.498.588.798,00**. Kinerja ini menyebabkan adanya efisiensi sebesar **Rp814.664.994,00** atau sebesar **1,75%**.

Adapun faktor Pendorong pencapaian kondisi meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan didorong diantaranya oleh kondisi:

1. Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui upaya pemenuhan pelayanan kebutuhan jamuan, operasional perjalanan dinas, pemenuhan sarana dan prasarana; pemeliharaan kebersihan dan keamanan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Terinformasikannya kegiatan pimpinan kepada masyarakat melalui upaya fasilitasi peliputan, penataan foto; konferensi pers bahan rilis berita Kada Wakada serta dokumentasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Terpenuhinya kebutuhan materi dan informasi pimpinan melalui upaya penyiapan kajian isu strategis Jawa Barat; analisis sentiment berita terhadap kinerja Pemda Jabar; penjaringan aspirasi masyarakat kepada pimpinan atau TEPAS; dan penjaringan berita dan isu di media sosial; penyiapan bahan materi pimpinan untuk konten kanal digital, media sosial, media elektronik, media online/cetak dan luar ruang; penyiapan naskah sambutan dan paparan pimpinan;
4. Terinformasikannya kegiatan pimpinan kepada masyarakat melalui media sosial Biro Administrasi Pimpinan serta penyiapan iklan layanan masyarakat.

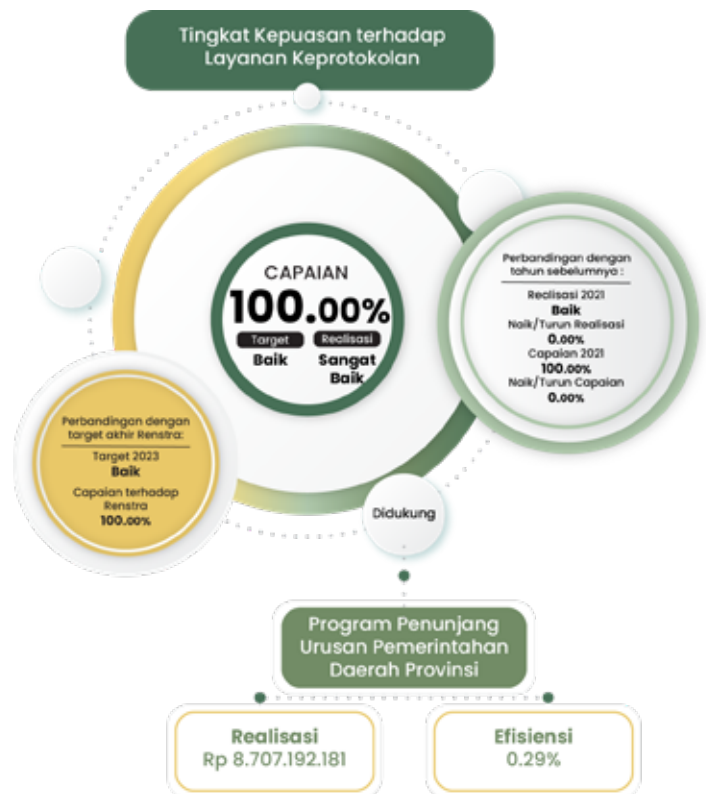


TINGKAT KEPUASAN TERHADAP LAYANAN KEPROTOKOLAN

Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan yang diterima. Pengukurannya dilakukan melalui survey kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh protokol dengan metode berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Capaian tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan pada Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi sangat baik dibandingkan dengan target tahun 2022 yang baik dan melampaui target renstra yang juga baik. Sedangkan untuk anggaran yang direalisasikan untuk mendukung indikator kinerja utama ini adalah sebesar **Rp8.707.192.181,00** atau sebesar **99,71%** dari pagu anggaran sebesar **Rp8.732.087.674,00** dengan jumlah efisiensi sebesar **Rp24.895.493,00** atau sebesar **0,29%**.

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah meningkatnya kualitas layanan keprotokolan, yang didukung pula oleh tingginya komunikasi antara pimpinan dan aparatur Biro Administrasi Pimpinan.



Hal ini menyebabkan minimnya distorsi informasi diantara kedua belah pihak sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi, utamanya pada pelayanan pengagendaan pimpinan lebih terjadwal dan penyusunan penjadwalan pimpinan lebih terstruktur

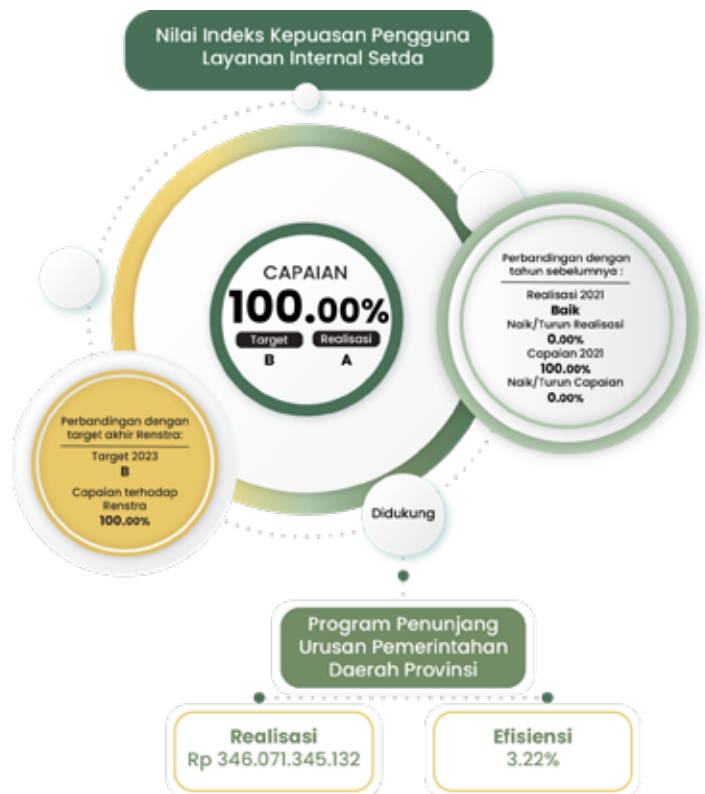
Disamping itu, kondisi meningkatnya layanan keprotokolan didorong oleh terwujudnya kondisi terpenuhinya kelengkapan dan perlengkapan acara, melalui upaya penyusunan rundown pelaksanaan acara; penyelenggaraan upacara/acara kenegaraan; penyusunan agenda kunjungan tamu kenegaraan; tersusunnya buku panduan acara; fasilitasi pengamanan tamu kenegaraan; fasilitasi penataan acara dan keprotokolan.



NILAI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN INTERNAL SETDA

Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Biro Umum. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.

Capaian nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal setda pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi A dibandingkan dengan target tahun 2022 yang B dan melampaui target renstra yang juga B. Sedangkan untuk anggaran yang direalisasikan untuk mendukung indikator kinerja utama ini adalah sebesar **Rp346.071.345.132,00** atau sebesar **96,78%** dari pagu anggaran sebesar **Rp357.583.852.907,00** dengan jumlah efisiensi sebesar **3,22%**.



Faktor Pendorong pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas layanan Biro Umum; didukung pula oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan kearsipan Setda dan meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Setda. Kondisi-kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah; pengelolaan keuangan dan asset; pengelolaan barang milik daerah; pelayanan kepegawaian dan arsip; layanan sarana prasarana air, listrik, konsumsi dan ruang rapat, pemeliharaan kebersihan, keamanan, serta layanan kebutuhan akomodasi pimpinan.

Adalah dengan adanya komitmen pimpinan dalam penerapan reformasi birokrasi mengakibatkan kemudahan persyaratan, peningkatan ketersediaan produk layanan, peningkatan perilaku pelaksana pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, penampilan petugas pelayanan, prosedur pelayanan yang mudah difahami, ketepatan waktu penyelesaian, peningkatan kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, kesigapan petugas, dan tersedianya informasi layanan.

Atas pencapaian kinerja Biro Umum tersebut, pada tahun 2022 Biro Umum mendapatkan peringkat ke-2 pada Laporan Audit Kearsipan Internal Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.



Sasaran Strategis IV

MENINGKATNYA KOLABORASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kolaborasi dalam pemerintahan bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan sebagai jawaban terhadap peningkatan kompleksitas permasalahan di masyarakat.

Di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tercantum bahwa 'kolaborasi' menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Kolaborasi ini, dilakukan baik antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan.

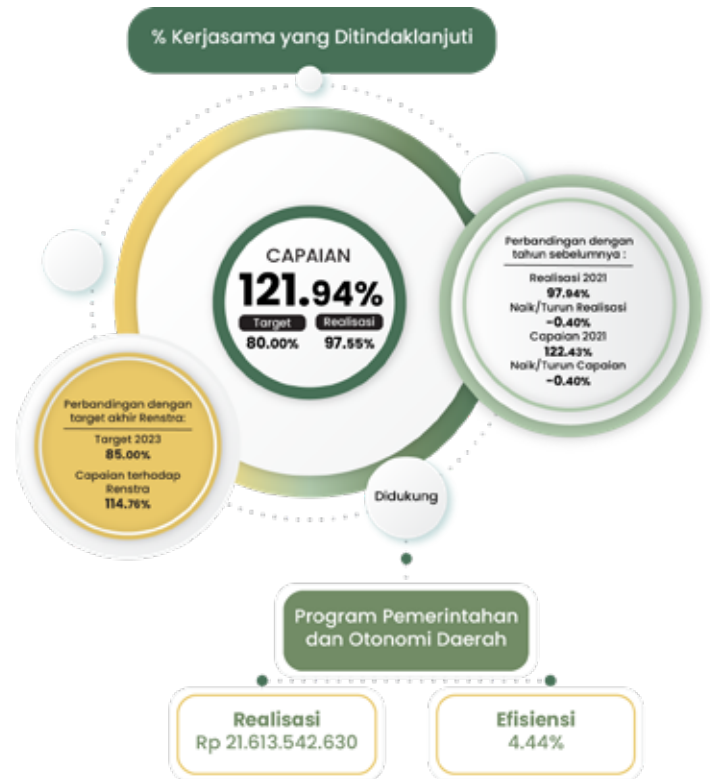
Implementasi kolaborasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditandai dengan pelaksanaan kerjasama baik yang dilaksanakan antar daerah, dengan pihak ketiga, serta dengan badan atau pemerintah luar negeri.

Hal ini pun menjadi salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Terlebih kerjasama antardaerah yang berbatasan bersifat wajib dengan pertimbangan adanya eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Maka dari itu, Setda menjadikan 'persentase kerjasama yang ditindaklanjuti' sebagai salah satu indikator yang menunjang perwujudan Jabar Juara.



PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI

Pelaksanaan kerjasama yang baik yang dilaksanakan antar daerah, dengan pihak ketiga maupun dengan badan atau pemerintah luar negeri meningkat. Sejumlah naskah kerjasama berganti status menjadi perjanjian kerjasama. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar **97,55%** atau dengan capaian sebesar **121,94%**. Capaian kinerja indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 sudah melebihi target yaitu sebesar **121,94%** walaupun turun 0,40% dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebanyak 8 (delapan) naskah kerjasama masih memerlukan proses pengkajian, dan dilanjutkan pada tahun 2023. Namun demikian, indikator ini telah melebihi target akhir Renstra Tahun 2023 yaitu dengan capaian **114,76%**. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.



Meningkatnya persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh meningkatnya Kerjasama ditandatangani dan ditetapkan sebanyak 318 naskah kerjasama dari 326 naskah kerjasama yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pencapaian kondisi tersebut didorong oleh terverifikasinya usulan-usulan Kerjasama daerah oleh DPRD dan pemerintah pusat yang diupayakan melalui penyusunan bahan kajian dan naskah Kerjasama daerah; penyusunan workplan sebagai langkah implementasi Kerjasama; serta pemantauan pelaksanaan Kerjasama daerah yang sudah ditandatangani.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase kerjasama ini yaitu dengan peningkatan kolaborasi yang didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong setiap pihak yang terlibat baik itu perangkat daerah terkait maupun entitas lainnya serta adanya dukungan sumber daya dan dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketercapaian kinerja didukung oleh anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar **Rp22.617.739.561,00** dan terealisasi sebesar **Rp21.613.542.630,00,00**. Lalu dari pemanfaatan tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar **Rp1.004.196.931,00** atau **4,44%**.



Sasaran Strategis V

MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN, PEMAHAMAN, PENGAMALAN KEAGAMAAN

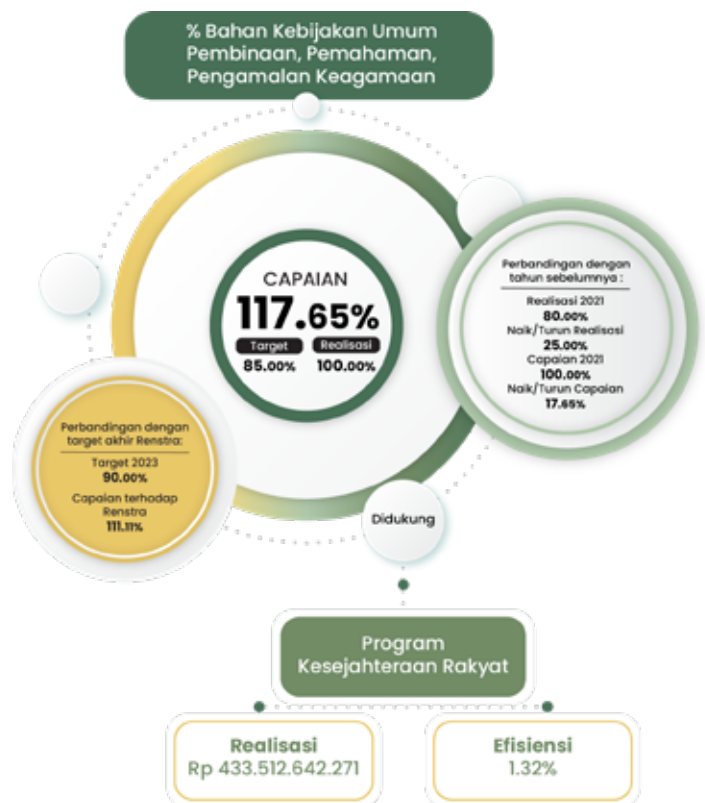
Sebagaimana Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memaknai kemerdekaan sebagai sesuatu yang diperoleh tidak hanya karena adanya usaha keras namun juga karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menginginkan pembangunan Jawa Barat diselenggarakan atas ridho-NYA.

Dengan demikian, pembangunan bathin masyarakat Jawa Barat menjadi sesuatu yang signifikan terutama dalam mempertahankan pembangunan dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga baik penyelenggaraan maupun hasil pembangunan dapat dinikmati dalam kondisi yang rukun, toleran, dipenuhi dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, Setda melalui kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat mengupayakan perwujudan kondisi tersebut melalui pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan masyarakat Jawa Barat.



INDIKATOR PERSENTASE KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN, PEMAHAMAN, PENGAMALAN KEAGAMAAN

Penetapan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan mengalami peningkatan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Persentase kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan pada tahun 2022 sudah sangat baik yaitu sebesar 100% dan mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator persentase kebijakan umum pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan pada tahun 2022 sudah sangat baik yaitu sebesar **117,65%** dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar **17,65%**. Capaian kinerja tahun 2022 sudah melebihi target akhir Renstra sebesar **111,11%**. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain.



Meningkatnya penetapan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan dipengaruhi oleh upaya penetapan rancangan kebijakan umum yang berkualitas sehingga dapat lebih tepat sasaran dan menyeluruh, karena dengan ditetapkannya kebijakan tentang keagamaan yang berkualitas akan meningkatkan pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan. Perwujudan kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas agenda setting, formulasi serta implementasi dan evaluasi kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan. Adapun upaya dalam mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui fasilitasi perumusan, komunikasi serta implementasi kebijakan dalam hal sarana dan prasarana Pendidikan agama dan kelembagaan bina mental spiritual. Lainnya melalui verifikasi usulan hibah Lembaga Pendidikan keagamaan dan ormas keagamaan; penyelenggaraan MTQ; penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama; pembinaan DKM dalam mengelola Masjid di Jawa Barat; pembinaan Hafiz Qur'an di setiap Desa di Jawa Barat; pembinaan Lembaga dan ormas keagamaan dalam mendukung umat beragama.

Upaya ini didukung oleh aktifnya koordinasi dengan pusat khususnya pada rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kerukunan umat beragama dari Pemerintah Pusat yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun daftar Kebijakan umum yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dan ditetapkan selama tahun 2022 terlampir pada akhir dokumen ini.

SASARAN V



Dari pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam bidang keagamaan, berhasil mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dihasilkan selama tahun 2022, terdiri dari Baznaz Award 2022; penghargaan Rekor MURI atas Wisuda Penghafal Al-Qur'an Terbanyak salam Satu Hari sebanyak 2000 Wisudawan; Penghargaan Penyelenggaraan Haji Terbaik Tahun 2022 oleh Kementerian Agama RI; Penghargaan Rekor MURI pada program pemberian Program JAMSOSTEK kepada Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Terbanyak.

Peningkatan indikator kinerja ini didukung pula oleh Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan anggaran **Rp439.332.419.575,00** dengan realisasi **Rp433.512.642.173,00** atau capaian **98,68%** dan efisiensi sebesar **Rp5.819.777.302,00** atau **1,32%**.



Sasaran Strategis VI

DIUSULKANNYA CALON DAERAH OTONOMI BARU UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN KE DPRD

**PENGUKURAN TINGKAT
KEBERHASILAN
SASARAN INI
MERUPAKAN INOVASI
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
MELALUI USULAN
PEMBENTUKAN DAERAH
PERSIAPAN OTONOMI
BARU.**

Pengukuran tingkat keberhasilan sasaran ini merupakan inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru. Berdasarkan laporan ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Sasaran terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan dengan indikator usulan pembentukan daerah persiapan otonom baru pada periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berjalan dengan baik. dari taget 6 (enam) usulan) daerah otonomi baru, terealisasi sebanyak 8 (delapan) usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru yang diproses hingga pemerintah pusat sampai dengan tahun 2022, diantaranya yaitu Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Utara, Garut Selatan, dan Indramayu Barat. Tambahan pada tahun 2022, usulan berasal dari Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut Utara. Hal ini memperlihatkan progress capaian kinerja pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Provinsi Jawa Barat sudah mencapai sebesar 133,33% dari target RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat.

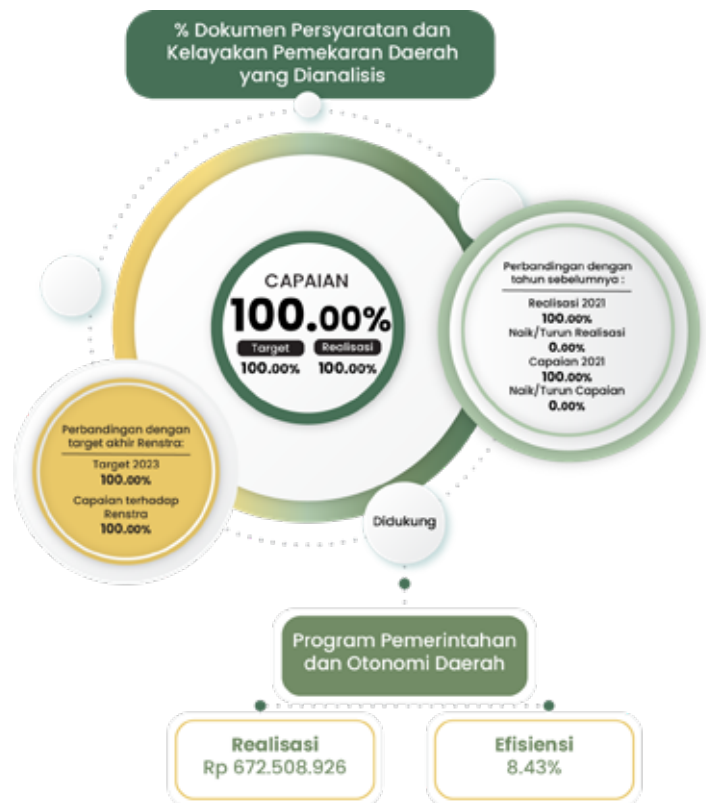
Ketercapaian indikator tersebut tidak terlepas dari peran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memfasilitasi usulan pemekaran daerah oleh Kabupaten/Kota kepada DPRD melalui analisis dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah. Maka, ditetapkan sasaran 'Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan Ke DPRD' dengan indikator 'Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis'. Adapun capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut



PERSENTASE DOKUMEN PERSYARATAN DAN KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH YANG DIANALISIS

Pada tahun 2022, ditargetkan 100% usulan pemekaran daerah otonomi baru dianalisis kelayakan dan kelengkapan persyaratannya dan kemudian diusulkan kepada DPRD. Adapun dari sebanyak 3 (tiga) usulan yang diterima Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah diantaranya yaitu Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut Utara, seluruhnya di nilai layak dan lengkap untuk kemudian diajukan kepada DPRD sehingga kinerja tercapai 100% sebagaimana yang ditargetkan. Pencapaian ini stabil sebagaimana realiasi tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra, capaian diperoleh 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi lain. Ketercapaian indikator ini didukung pula oleh pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan pagu anggaran sebesar **Rp734.444.040,00** dan terealisasi sebesar **Rp672.508.926,00** atau **91,57%**. Dari anggaran tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar **Rp61.935.114,00** atau sebesar **8,43%**.

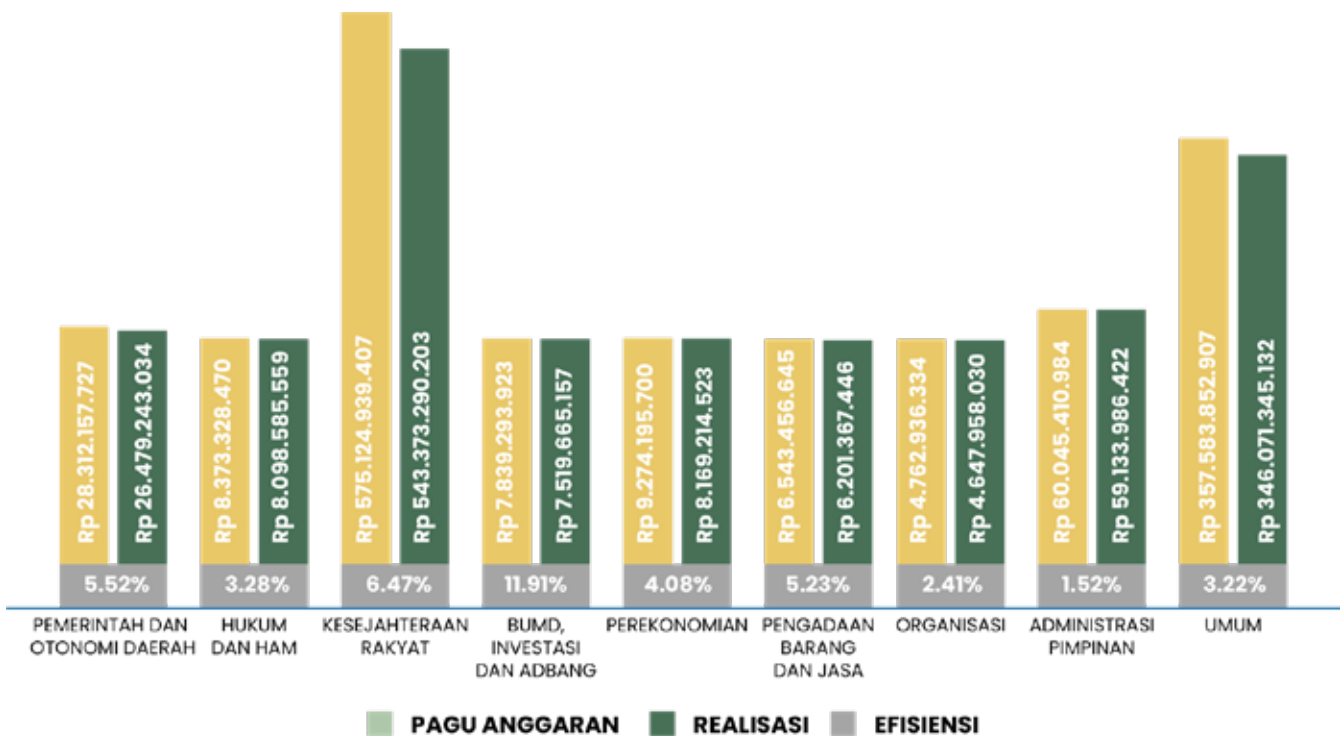
Diusulkannya calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD, didorong oleh kondisi tersedianya usulan daerah otonomi baru, yang memenuhi persyaratan melalui penyusunan kajian verifikasi usulan daerah otonom baru kabupaten/kota.



adalah pemahaman Kabupaten/Kota pengusul terhadap persyaratan pengusulan pemekaran daerah meningkat. Hal ini merupakan dampak dari upaya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terus menerus melakukan pendampingan dan share knowledge kepada Kabupaten/Kota terkait pemekaran daerah. Selain itu, terdapat Upaya koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan calon daerah penetapan otonomi baru di Provinsi Jawa Barat dapat disetujui dan dibentuk dengan pertimbangan seluruh persyaratan terpenuhi.



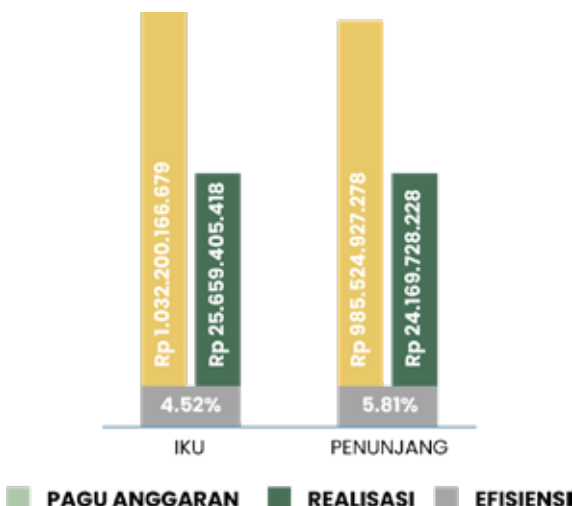
AKUNTABILITAS KEUANGAN



Tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar **Rp1.057.859.572.097,00** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp1.009.694.655.506,00**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **95,45%**. Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **4,5%** atau **Rp48.164.916.591,00**.

Secara lebih rinci, perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja core business dan kinerja penunjang adalah **40:1**. Anggaran pada core business ditetapkan sebesar **Rp1.032.200.166.679,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp985.524.927.278,00**. Dengan demikian, kinerja anggaran pada core business tercapai **95,48%** dan dapat diefisiensi sebesar **Rp46.675.239.401,00** atau **4,52%**.

ANGGARAN PENUNJANG



Anggaran penunjang ditetapkan sebesar **Rp25.659.405.418,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp24.169.728.228,00** atau kinerja tercapai sebesar **94,19%**. Dari kinerja ini, anggaran dapat diefisiensi sebesar **Rp1.489.677.190,00** atau **5,81%**.



BAB IV

PENUTUP



LKIP SETDA 2022

Merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 118,19%. Sebanyak 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.009.694.655.506,00** dengan total efisiensi sebesar **4.5%** atau senilai **Rp48.164.916.591,00**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.





LAMPIRAN



Tabel 1. Output Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
1	Peraturan Gubernur	28 Tahun 2022	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Daerah Provinsi Jawa Barat
2	Keputusan Gubernur	556.05/Kep.417-Kesra/2022	Personalisa Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat
3	Keputusan Gubernur	426/Kep.638-Kesra/2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.133-Dispora/2022 Tentang Penunjukkan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
4	Keputusan Gubernur	440/Kep.339-Kesra/2022	Kelompok Kerja Diagnosis Dan Pengobatan Malaria Di Daerah Eliminasi Dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria
5	Keputusan Gubernur	420/Kep.157-Kesra/2022	Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat
6	Keputusan Gubernur	556.05/Kep.417-Kesra/2022	Personalialia Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat
7	Keputusan Gubernur	524.3/Kep.353-Kesra/2022	Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban pada Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Jelang Hari Raya Idul Adha 2022/1443 Hijriah
8	Instruksi Gubernur	01/KS.01.02.02/Kesra	Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
9	Surat Edaran	27/KS.14/Kesra	Komitmen Kabupaten/Kota Dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Tabel 2. Output Bahan Kebijakan Umum Lingkup BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
1	Peraturan Daerah	3 Tahun 2022	Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda)
2	Peraturan Daerah	5 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang PT. Tirta Gemah Ripah
3	Peraturan Daerah	6 Tahun 2022	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah
4	Peraturan Daerah	7 Tahun 2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT Migas Hulu Jabar.
5	Peraturan Gubernur	15 Tahun 2022	Penugasan kepada PT. Agro Jabar kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2022.
6	Keputusan Gubernur	900/Kep-78-BUMDINVESADBANG/2022	Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada 35 (Tiga Puluh Lima) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
7	Keputusan Gubernur	582.05/Kep.265-BUMDINVESADBANG/2022	Tim Pendamping Pengembangan Investasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
8	Keputusan Gubernur	539.05/Kep.154-BUMDINVESADBANG	Panitia Seleksi Calon Direksi PT. Agronesia Tahun 2022
9	Keputusan Gubernur	539/Kep.585-BUMDINVESADBANG/2022	Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan Tahun 2022
10	Keputusan Gubernur	539.05/Kep.239-BUMDINVESADBANG/2022	Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan Tahun 2022
11	Keputusan Gubernur	916/Kep.304-BUMDINVESADBANG/2022	Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Daerah (RKPM) Provinsi Jawa Barat pada APBD Perubahan T.A. 2022 dan APBD T.A. 2023.
12	Keputusan Gubernur	539.05/Kep.584-BUMDINVESADBANG/2022	Panitia Seleksi Direksi Perseroan Terbatas Agro Jabar Tahun 2022
13	Keputusan Gubernur	553/Kep.559-BUMDINVESADBANG.2022	Tim Assessment Pemilihan Calon Mitra Strategis PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB)
14	Keputusan Gubernur	916/Kep.478-BUMDINVESADBANG/2022	Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 916/Kep.304-Bumdinvesadbang/2022 Tentang Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
15	Keputusan Gubernur	539/Kep.754-BUMDINVESADBANG/2022	Penunjukan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat Masa Tugas 2022-2025
16	Keputusan Gubernur	553.2/Kep.812-BUMDINVESADBANG/2022	Pengesahan Dokumen Perencanaan Induk (Masterplan) dan Penetapan Pengusahaan Kertajati Aerocity
17	Surat Edaran Sekretaris Daerah	45/KU.03.10.02/Bumdinvesadbang	kepada Direksi dan Komisaris BUMD Provinsi Jawa Barat - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penjaminan
18	Surat Edaran Sekretaris Daerah	44/KU.03.10.02/Bumdinvesadbang	kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penjaminan
19	Surat Edaran Sekretaris Daerah	68/OT.01/BUMDINVESADBANG	Panduan Teknis Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20	Surat Edaran Sekretaris Daerah	78/IB.04.03/BUMDINVESADBANG	kepada Dekom/Pengawas dan Direksi BUMD Non Lembaga Keuangan - Penetapan Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Tahunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Lembaga Keuangan Provinsi Jawa Barat

Tabel 3. Output Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
1	Peraturan Gubernur	6 Tahun 2022	Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
2	Peraturan Gubernur	33 Tahun 2022	Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027
3	Keputusan Gubernur	751.05/Kep.336-Rek/2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 751.05/Kep.126-Rek/2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat
4	Keputusan Gubernur	500.05/Kep.598-Rek/2022	Panitia Penyelenggaraan Kegiatan West Java Investment Summit Tahun 2022
5	Keputusan Gubernur	610/Kep.890-Rek/2021	Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat
6	Keputusan Gubernur	060.05/Kep.88-Rek/2022	Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Prov. Jabar.
7	Keputusan Gubernur	821.2/Kep.224-Rek/2022	Pemberhentian Kepala Sekretariat Dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Cirebon Periode Tahun 2017-2023
8	Keputusan Gubernur	751.05/Kep.126-Rek/2022	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat
9	Keputusan Gubernur	751.05/Kep.336-Rek/2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 751.05/Kep.126-Rek/2022 Tentang Tim

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat
10	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.414-Rek/2022	Pemberhentian Anggota Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023
11	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.552-Rek/2022	Pemberhentian Anggota Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Cirebon Periode Tahun 2020-2025
12	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.676-Rek	Pemberhentian Anggota Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2019-2024
13	Keputusan Gubernur	821.2/Kep.703-Rek/2022	Pengangkatan Anggota Bpsk Daerah Kota Sukabumi Periode Tahun 2022-2027
14	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.828-Rek/2022	Pengangkatan Anggota Bpsk Daerah Kab. Bandung Periode Tahun 2022-2027
15	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.829-Rek/2022	Pengangkatan Anggota Bpsk Daerah Kab. Bandung Periode Tahun 2022-2027
16	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.829-Rek/2022	Pengangkatan Anggota Bpsk Daerah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2022-2027
17	Keputusan Gubernur	821.2/Kep.277-Rek/2022	Pemberhentian Kepala Sekretariat Dan Anggota Sekretariat Serta Pengangkatan Kepala Sekretariat Dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
			Cirebon Periode Tahun 2017-2023
18	Keputusan Gubernur	821.2/Kep.278-Rek/2022	Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK Daerah Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024
19	Keputusan Gubernur	821.2/Kep.850-Rek/2022	Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Bpsk Daerah Kabupaten Garut Periode Tahun 2022-2028
20	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.786-Rek/2022	Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti BPSK Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2019-2024
21	Keputusan Gubernur	821.29/Kep.787-Rek/2022	Pengangkatan Anggota BPSK Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2022-2027
22	Keputusan Gubernur	520.05/Kep. 108-Rek / 2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05 / Kep.219 -Rek / 202 Tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tanggal 11 Maret 2022
23	Keputusan Gubernur	521.34/Kep.550-Rek/2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.844-Rek/2021 Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
24	Keputusan Gubernur	521.34/Kep.592-Rek/2022	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.844-Rek/2021 Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
			Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
25	Keputusan Gubernur	520/Kep.260-Distanhorti/2022	Tim Penilai Pelaku Pertanian Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
26	Keputusan Gubernur	002.6/Kep.397-Bkd/2022	Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Petani Milenial Yang Telah Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Petani Milenial Tahun 2022
27	Keputusan Gubernur	520.05/Kep.243-Rek/2022	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05/Kep.219-Rek/2021 Tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
28	Keputusan Gubernur	761/Kep.574-Rek/2022	Rencana Tata Tanam Global Dan Rencana Alokasi Air Irigasi Tahunan Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Dan Kewenangan Provinsi Pada Wilayah Kerja Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat Musim Tanam 2022/2023 Dan Musim Tanam 2023
29	Keputusan Gubernur	526.05/Kep.164-Rek/2022	Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat
30	Keputusan Gubernur	524.3/Kep.384-Rek/2022	Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak di Daerah Provinsi Jawa Barat
31	Keputusan Gubernur	526.05/Kep.385-Rek/2022	Penetapan Team of Teams Pusat Komando Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat
32	Keputusan Gubernur	976/Kep.204-Rek/2022	Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
			Hasil Cukai Hasil Tembakau
33	Keputusan Gubernur	522.4/Kep.293-Rek/2022	Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 522.4/Kep.594-Dishut/2013 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Pantai
34	Keputusan Gubernur	590.05/Kep.225-Rek/2022	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur No. 590.05/Kep.360-Prodi/2018 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat
35	Keputusan Gubernur	522/Kep.291-Rek/2022	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.05/KEP.1086-PRODI/2018 Tentang Tim Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan Hutan Negara, Perkebunan Negara Dan Perkebunan Besar Swasta di Jawa Barat
36	Keputusan Gubernur	610/Kep.66-DSDA/2022	Harga Dasar Air Permukaan
37	Keputusan Gubernur	610/Kep.142-DSDA/2022	Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
38	Keputusan Gubernur	611/Kep.637-DSDA/2022	Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat
39	Keputusan Gubernur	671/Kep.684-Rek/2022	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2050
40	Keputusan Gubernur	671/Kep.906-Rek/2022	Pemberian Mandat untuk Penandatanganan Penetapan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
41	Keputusan Gubernur	600.1/Kep.226-Rek/2022	Komite Pengembangan Jasa Lingkungan
42	Keputusan Gubernur	660.05/Kep.459-DLH/2022	Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur No. 660.05/Kep.485-

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
			DLH/2017 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
43	Surat Edaran	70/KS.01.1.08/Perek	Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
44	Surat Edaran	90/KS.01.01.08/Perek	Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Pasca Penetapan Wabah
45	Surat Edaran	21/KS.03.01.01/Perek	Perubahan Angka Kecukupan Gizi yang Dipergunakan Dalam Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
46	Surat Edaran	75/AR.06.04/Perek	Pengawasan Minyak Goreng Curah Rakyat
47	Surat Edaran	67/RT.03.03/Perek	Pengembangan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap kepada PD Provinsi Jawa Barat
48	Surat Edaran	115/PI.13.03.01/PEREK	Himbauan Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
49	Surat Edaran	30/PBLS.04/PEREK	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
50	Surat Edaran	46/BP.03.05/PEREK	Gerakan Global Switch Off Earth Hour 2022
51	Surat Himbauan	1093/Pr.01/Perek	Himbauan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)

Tabel 4. Output Bahan Kebijakan Bidang Keagamaan

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Hal
1	Peraturan Daerah	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
2	Peraturan Gubernur	183	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
3	Keputusan Gubernur	450/Kep.235-Kesra/2022	Penempatan Hafidz Dan Hafidzoh Pada Program Satu Desa Satu Hafidz Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
4	Keputusan Gubernur	450.05/Kep.233-Kesra/2022	Tim Penyelenggara Kegiatan Satu Desa Satu Hafidz
5	Keputusan Gubernur	450/Kep.303-Kesra/2022	Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Xxxvii Tingkatdaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
6	Keputusan Gubernur	450.05/Kep.302-Kesra/2022	Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an Xxxvii Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
7	Keputusan Gubernur	406/Kep.175-Kesra/2022	Penerima Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
8	Keputusan Gubernur	451.14/Kep.617-Kesra/2022	Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Daerah Provinsi Jawa Barat Ke Musabaqoh Tilawatil Qur'an Xxix Tingkat Nasional Tahun 2022

Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

URAIAN			KINERJA TAHUN n			PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DENGAN n-1					PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DENGAN TARGET RENSTRA		PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA				PROGRAM PENDUKUNG	PEMANFAATAN ANGGARAN				
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022 (%) =(5/4)*100	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%) =(8/7)*100	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022 =(6-9)/9*100	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2022 =(5-8)/8*100	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2023 (%) =(5/12)*100	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran (Rp000)	Selisih Anggaran	Capaian 2022 (%)	Efisiensi (%)
																				=19-20	=(20/19)*100	=(22/19)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN																						
1	% Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	85.00	98.00	115.29	80.00	80.00	100.00	15.29	22.50	90.00	108.89	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Kesejahteraan Rakyat	131,239,175	105,537,452	25,701,723	80.42	19.58
2	% Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum terkait BUMD, BLUD, investasi daerah, dan administrasi pembangunan yang disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	90.00	100.00	111.11	90.00	95.25	105.83	4.99	4.99	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Perekonomian dan Pembangunan	4,965,222	4,752,313	212,908	95.71	4.29
																	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	797,889	778,110	19,779	97.52	2.48
3	% Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan daerah berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan Jawa Barat dirumuskan, diimplementasi, dan dievaluasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	90.00	111.11	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,541,892	2,281,343	260,549	89.75	10.25
Efisiensi Sasaran 1																		139,544,178	113,349,218	26,194,960	81.23	18.77
SASARAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN																						
4	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah	A	A	100.00	A	A	100.00	0.00	0.00	AA	100.00	B	N/A	Salah satu dari 3 provinsi yang memperoleh Kategori A	Salah satu dari 5 provinsi yang memperoleh Kategori A	Program Penataan Organisasi	557,304	554,527	2,778	99.50	0.50
5	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai yang menggambarkan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN sehingga menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.	3.55	4.92	138.59	3.45	3.97	115.07	20.44	23.93	3.65	134.79	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penataan Organisasi	868,940	853,256	15,684	98.20	1.84

URAIAN			KINERJA TAHUN n			PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DENGAN n-1					PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DENGAN TARGET RENSTRA		PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA				PROGRAM PENDUKUNG	PEMANFAATAN ANGGARAN				
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2022	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2023 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran (Rp000)	Selisih Anggaran	Capaian 2022 (%)	Efisiensi (%)
					= (5/4)*100			= (8/7)*100	= (6-9)/9*100	= (5-8)/8*100		= (5/12)*100								= 19-20	= (20/19)*100	= (22/19)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai yang menggambarkan adanya upaya evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan sehingga terwujud organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	4.06	7.09	174.63	3.94	3.75	95.18	83.48	89.07	4.18	169.62	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penataan Organisasi	1,033,097	961,160	71,937	93.04	7.48
7	Nilai Penataan Tatalaksana	Nilai yang menggambarkan adanya upaya perubahan pada sistem tatalaksana dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	3.30	6.20	187.88	3.20	3.31	103.44	81.64	87.31	3.40	182.35	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penataan Organisasi	213,220	213,184	36	99.98	0.02
8	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai yang menggambarkan adanya upaya penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik untuk mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan	4.18	6.23	149.04	4.06	4.57	112.56	32.41	36.32	4.30	144.88	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Penataan Organisasi	172,003	171,750	253	99.85	0.15
9	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indikator yang menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa suatu instansi pemerintah	80.00	80.20	100.25	70.00	61.57	87.96	13.98	30.26	90.00	89.11	68.33	117.37	Peringkat 2 Se Pulau Jawa	Peringkat 4 Level Nasional	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4,084,985	3,914,991	169,994	95.84	4.16
10	% Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	Indikator ini menggambarkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada fungsi fasilitasi penetapan produk hukum serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemenuhan HAM	100	100	100.00	80.00	100.00	125.00	-20.00	0.00	100.00	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6,333,035	6,085,509	247,526	96.09	3.91
11	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Indikator yang menggambarkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.34	3.34	100.00	3.33	3.33	100.00	0.00	0.45	3.35	99.82	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2,343,854	1,756,923	586,931	74.96	25.04
12	% Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja pada tugas dan fungsi fasilitasi administrasi pemerintahan umum provinsi dan kabupaten/kota	90.00	100.00	111.11	90.00	90.00	100.00	11.11	11.11	90.00	111.11	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,550,418	1,403,255	147,163	90.51	9.49
Efisiensi Sasaran 2																		17,156,856	15,914,554	1,242,302	92.76	7.24
SASARAN 3 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DAERAH																						
13	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) terhadap layanan yang diberikan	Baik	Sangat Baik	100.00	Baik	Baik	100.00	0,00	0,00	Baik	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46,498,589	45,683,924	814,665	98.25	1.75

URAIAN			KINERJA TAHUN n			PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DENGAN n-1					PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DENGAN TARGET RENSTRA		PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA				PROGRAM PENDUKUNG	PEMANFAATAN ANGGARAN				
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022 (%) =(5/4)*100	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%) =(8/7)*100	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022 =(6-9)/9*100	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2022 =(5-8)/8*100	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2023 (%) =(5/12)*100	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran (Rp000)	Selisih Anggaran	Capaian 2022 (%)	Efisiensi (%)
																				=19-20	=(20/19)*100	=(22/19)*100
14	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan yang diterima	Baik	Sangat Baik	100.00	Baik	Baik	100.00	0,00	0,00	Baik	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,732,088	8,707,192	24,895	99.71	0.29
15	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	B	A	100.00	Baik	Baik	100.00	0,00	0,00	B	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	357,583,853	346,071,345	11,512,508	96.78	3.22
Efisiensi Sasaran 3																		412,814,529	400,462,461	12,352,068	97.01	2.99
SASARAN 4 MENINGKATNYA KOLABORASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH																						
16	% Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menggambarkan kewajiban para pihak yang dicantumkan dalam kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pihak lain (pmda lain, instansi luar negeri, pihak ketiga) dipenuhi seluruhnya.	80	97.55	121.94	80.00	97.94	122.43	-0.40	-0.40	85.00	114.76	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	22,617,740	21,613,543	1,004,197	95.56	4.44
Efisiensi Sasaran 4																		22,617,740	21,613,543	1,004,197	95.56	4.44
SASARAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN, PEMAHAMAN, PENGAMALAN KEAGAMAAN																						
17	% Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum terkait pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan yang disusun dan ditetapkan.	85	100	117.65	80.00	80.00	100.00	17,65	25,00	90,00	111,11	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Kesejahteraan Rakyat	439,332,420	433,512,642	5,819,777	98.68	1.32
Efisiensi Sasaran 5																		439,332,420	433,512,642	5,819,777	98.68	1.32
SASARAN 6 DIUSULKANNYA CALON DAERAH OTONOMI DAERAH UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN KE DPRD																						
18	% Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Indikator yang menunjukkan dilakukannya kajian terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk memastikan bahwa usulan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan penundang-undangan.	100	100	100.00	100.00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	734,444	672,509	61,935	91.57	8.43
Efisiensi Sasaran 6																		734,444	672,509	61,935	91.57	8.43